

ISSN 2303-0070

Volume 1/No.02/Desember/2012

# VALUE

Jurnal Evaluasi & Asesmen Pendidikan



PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



# VALUE

Jurnal Evaluasi & Asesmen Pendidikan

Volume I/No.02/Desember/2012



Diterbitkan oleh:

Pusat Penilaian Pendidikan  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# © VALUE

Jurnal Evaluasi & Asesmen Pendidikan

Terbit 2 edisi per tahun (Juni dan Desember)

ISSN: 2303-0070

Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian  
atau keseluruhan dalam berbagai  
bentuk medium baik cetakan,  
elektronik, atau pun mekanik  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**VALUE**, akronim dari **eVALUasi dan asEsmen**, merupakan Jurnal di bidang Ilmiah Evaluasi dan Asesmen/Penilaian Pendidikan yang dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerbitkan hasil karya penelitian (*original research*), karya pengembangan, tinjauan kembali (*review*), dan ulasan topik khusus dalam bidang Evaluasi dan Asesmen Pendidikan. Kesempatan menulis terbuka untuk umum meliputi para peneliti dan perekayasa lembaga riset, pengajar perguruan tinggi maupun pekarya-tesis sarjana semua strata. Karya tulis harus ditulis sesuai pedoman penulisan yang tercantum dalam setiap edisi.

## **Dewan Pengurus**

Penanggung Jawab : Hari Setiadi, Ph.D.  
Dewan Redaksi : Dr. Mahdiansyah, MA, Drs. Giri Sarana Hamiseno, Dra. Arniati, M.Psi,  
Drs. Safari, MA, APU, Drs. Witjaksono, MA, Drs. Rogers Pakpahan, M.Si,  
Dra. A. Hendriastuti, MA, Dra. Rahmah Zulaiha, MA.  
Mitra Bestari : Dr. Burhanuddin Tola, Jahja Umar, Ph.D, Bastari, Ph.D.  
Pemimpin Redaksi : Bagus Hary Prakoso, SE, MA  
Tata Usaha : Susi Mahyudin, M.Pd, Sidik Pranyoto, S.Kom  
Sekretaris Redaksi : Drs. Didi Pujohadi, Wuri Rohayati, S.S.

## **Alamat Redaksi**

Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), Jl. Gunung Sahari Raya no. 4, Jakarta Pusat, 10710  
Tel. 62.21.3847537, 3847637, Fax. 3849451, **E-mail: [jurnalvalue@gmail.com](mailto:jurnalvalue@gmail.com)**

## Pedoman Penulisan Artikel

1. Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, opini, wawasan, pandangan, kajian pustaka, berita, dan resensi buku dari peneliti, praktisi dan pemerhati di bidang evaluasi dan asesmen pendidikan.
2. Naskah dalam bentuk *hard copy* di kirim ke redaksi dan naskah *soft copy* dikirim melalui e-mail: jurnalvalue@gmail.com dan disertai dengan **biodata lengkap** penulis.
3. Ketentuan penulisan secara umum.
  - a. Naskah ditulis dalam bentuk esai dan belum pernah diterbitkan di media lain.
  - b. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dan ejaan, yang dimuat dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD).
  - c. Naskah diketik dengan format MS-Word, **Font Calibri** ukuran 11, spasi 1 jumlah halaman minimum 7 dan maksimum 20, ukuran kertas A4.
4. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut :
  - a. Penulis harus mencantumkan nama, instansi, dan email di bawah judul artikel.
  - b. Artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus menuliskan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  - c. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%).
  - d. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (20%).
  - e. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
  - f. Hasil dan Bahasan (50%).
  - g. Simpulan dan Saran (10%)
  - h. Daftar Pustaka.

(Sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum, penulis dapat mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini).

**Artikel pemikiran dan atau reviu teori** memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasinya dari jumlah halaman sebagai berikut :

- a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan (15%).
- b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (75%).
- c. Simpulan dan Saran (10%)
- d. Daftar Pustaka

(Sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum, penulis dapat mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini).

**Artikel resensi buku** selain menginformasikan bagian-bagian penting dan buku yang dirensi juga menunjukkan bahasan secara mendalam kelebihan dan kelemahan buku tersebut serta membandingkan teori/konsep yang ada dalam buku tersebut dengan teori/konsep dari sumber-sumber lain.

5. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Aiken, Lewis R. (1994). *Psychological Testing and Assessment*, (Eighth Edition). Boston: Allyn and Bacon.

Harding, J and Meldon-Smith, L. (2000). *How to make observations & assessments (second edition)*. London: Hodder & Stoughton.

# DAFTAR ISI

VALUE, Jurnal Evaluasi & Asesmen Pendidikan  
Volume I/No.02/Desember/2012

	Halaman
Dewan Pengurus dan Alamat Redaksi .....	iv
Pedoman Penulisan Artikel .....	v
Daftar Isi .....	vii
The Grade-12 Science Students' Perception on the Implementation of the New 2004 Curriculum/Revised 2006 Curriculum (KTSP) Policy .....	1
<i>R. Witjaksono</i>	
Perbedaan Kemampuan Siswa SMP Negeri dan Swasta Terhadap Hasil UN 2011-2012.....	14
<i>Safari</i>	
Pengujian Berimbang: Refleksi dan Tinjauan Kritis dari Perspektif Alqur'an.....	27
<i>Samsir Alam</i>	
Ujian Nasional Sebagai Alat Intervensi Pembudayaan Karakter Bangsa.....	42
<i>Deni Hadiana</i>	
Penguasaan Materi Puisi pada Siswa SMA IPA dan IPS Berdasarkan Hasil UN2011-2012.....	53
<i>Safari</i>	
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 2012 di Provinsi Gorontalo.....	64
<i>Rogers Pakpahan</i>	
Model Asesmen untuk Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa SD dan SMP.....	72
Ana Ratna Wulan, Elah Nurlaelah, Khaerudin Kurniawan, Setiya Utari, Fajri Nur Yusuf	

# THE GRADE-12 SCIENCE STUDENTS' PERCEPTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE NEW 2004 CURRICULUM/REVISED 2006 CURRICULUM (KTSP) POLICY

R. Witjaksono

Perekayasa di Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud

## ABSTRAK

*Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas persepsi siswa SMA kelas-12 IPA mengenai implementasi kebijakan kurikulum baru tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi – KBK/selanjutnya direvisi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan - KTSP, yang difokuskan pada paradigma baru dalam proses pembelajaran.*

*Studi ujicoba dan penelitian utama di lapangan, yang melibatkan beberapa metode studi kasus, yaitu: review dokumen resmi, wawancara individu, diskusi kelompok, dan observasi kelas secara langsung, masing-masing berlangsung antara bulan Juli dan September 2004 dan 2005. Kunjungan studi kasus dilakukan terhadap sampel yang terdiri atas: 5 pemangku kebijakan yang berasal dari lima institusi pemerintah yang berbeda di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, 3 kepala sekolah SMAN, 8 guru SMAN yang mengampu kimia, dan 3 (dari total 4) kelompok siswa/i SMA kelas-12 IPA yang masing-masingnya terdiri atas enam orang yang berasal dari 3 (dari total 4) SMAN di Jakarta. Data mentah yang dikumpulkan, kemudian, dikelola dan dianalisis dengan menggunakan analisis wacana dan analisis isi. Akhirnya, temuan utama penelitian ini diinterpretasikan berdasarkan paradigma yang dianut oleh peneliti, yaitu sosial-konstruktivisme.*

*Peneliti berpendapat bahwa siswa/i SMAN yang dijadikan sampel penelitian ini perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang reformasi kurikulum yang sedang berlangsung di sekolah mereka. Mereka tidak boleh dijadikan sebagai objek reformasi. Suara mereka perlu didengar, bukan dimarginalisasi. Ini berarti bahwa pada implementasi kebijakan kurikulum baru di tingkat sekolah/kelas, harus ada alternatif dalam mekanisme komunikasi yang selanjutnya akan membantu menggeser kekuasaan dari guru kimiakesiswa/i SMAN kelas-12 IPA sampai diperoleh keseimbangan kekuasaan. Di samping itu, siswa/i tersebut seharusnya mempunyai kesempatan untuk menggali pengalaman melalui berbagai macam aktivitas mereka di sekolah yang mempunyai berbagai fasilitas yang mendukung. Dengan demikian mereka akan mengetahui bahwa sekolahnya menerapkan struktur pembelajaran yang demokratis, bukan struktur terkontrol dengan ketat yang berasal dari lapisan birokrasi pendidikan.*



*Perlu dicatat bahwa penelitian terhadap topik ini berlangsung sampai dengan tahun 2007 dan merupakan salah satu (dari 21) temuan utama penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Penilaian Pendidikan Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, KBK, 2004 yang Direvisi Menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP Pada Tahun 2006: Studi Kasus di 4 SMAN di Jakarta, Indonesia.” (Witjaksono, 2007).*

*Dalam membahas topik ini, peneliti memandangnya dari berbagai perspektif secara kritis, sehingga makalah ini cukup menantang.*

**Kata Kunci:** Paradigma Baru dalam Proses Pembelajaran

### **ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to discuss the grade-12 science students’ perception on the implementation of the new 2004 curriculum policy. That is about the implementation of the new teaching-learning paradigm.*

*The pilot study and fieldwork, involving multiple methods of a case study – review of official documents, face-to-face interviews and focus group discussions, and direct classroom observations – took place between July and September 2004 and 2005, respectively.*

*Case study visits were made to a sample of 5 policy makers from five differing government bodies at the Ministry of National Education, 3 head-teachers, 8 chemistry teachers, and 3 (out of 4) groups of the grade-12 six science students senior general secondary public schools in Jakarta. The collected raw data was, then, managed and analysed using discourse analysis and content analysis. Finally, the key findings were interpreted based on the researcher’s paradigm of socio-constructivism.*

*The researcher found that the grade-12 science students need to be involved in the decision making process about the ongoing curriculum reforms in their schools. They should not be used as the object of reform. Their voices must be heard, not marginalized. This means that in the new 2004 curriculum policy implementation at the school/classroom level, there must be alternative in relation to the mechanism of communication. This further will help shift the power from the chemistry teachers to the grade-12 science students to obtain the balance of power. In addition, the students should have the opportunity to explore their experience through a variety of activities in their rich-resources schools. By doing so, it is likely that they know their schools implement democratic structures of the teaching-learning process rather than strictly controlled structures, coming from a series of educational bureaucratic layers.*

*It should be noted that the topic addressed on this paper is drawn upon ongoing work by the researcher until the year of 2007. In addition, this topic constitutes one (out of 21) of the key research findings on "Policy Analysis on Educational Assessment in Relation to the Implementation of The New 2004 Curriculum/Revised 2006 Curriculum (KTSP): A Case Study of Four Senior General Secondary Schools in Jakarta, Indonesia." (Witjaksono, 2007).*

*In addressing the topic on this paper, the researcher views it from a variety of critical perspectives. This paper will be challenging and straightforward.*

**Keyword:** *New Teaching-Learning Paradigm*

## **INTRODUCTION**

The pupil voice movement represents a new departure because it is based on the premise that schools should reflect the democratic structures in society at large. Under this conception the school becomes a community of participants engaged in the common endeavour of learning. (Flutter & Rudduck, 2004, p. 135).

According to the Rights of the Child, declared on the United Nations Convention (1989), it was ensured that the rights of children have been to actively participate in all matters concerning them. As a consequence, there has been increased international attention to using student perspectives to develop educational processes (Noyes, 2005).

In the Indonesian context, relating to the implementation of the new 2004 curriculum (competency-based curriculum), students have been perceived as the main focus of the process of education. This means that there has been a shifting focus on the teaching-learning paradigm from teacher centre to student centre. This also means that their differing interests, needs and cultures in an effort to achieve their educational experience and attainment should be accommodated, through their engagement in/out of the classroom activities (Pusat Kurikulum, 2004). What happens in reality?

To know in more detail about what was going on in the black box of the teaching-learning process, the researcher researched explicitly through a variety of approaches underlying issues of power and the potential for students'voice approaches to shape more democratic schools.

## **RESEARCH METHOD**

### **Background and Rationale**

In relation to the educational assessment policy, there are three contexts that need to be considered, namely, policy formulation, policy text production and policy practice (Bowe et.al., 1992). In light of the educational assessment policy, a review of the literature reveals that the study of the policy formulation and practice on a range of educational assessment purposes, as well as its role and function, has received little attention (McDonnell, 1994). Much of educational assessment literature focuses on the practice of assessment. Therefore, it is necessary to study and analyse them through the implementation of the new 2004 curriculum/revised 2006-KTSP and assessment policies to help guide research in this area.

The introduction of the mandated 2004 curriculum/revised 2006-KTSP and assessment policies at the school level, however, raises a new issue: *How have the teachers' classroom*

*assessment practices, integrated with their teaching-learning activities, been changing?* This problem of putting the ideas into practice, from the policy formulation to the policy implementation, is then reflected through three main research questions addressed to govern the study. For the purpose of this paper, however, only one related research question is going to be discussed:

*Are the new assessment practices, integrated with the new teaching-learning activity, implemented by chemistry teachers as well as by grade-12 science students at four senior general secondary public schools in Jakarta?*

The purpose of investigating this study in relation to the new 2004 curriculum/revised 2006-KTSP and assessment policy practices is to find out gaps between what is stated and written at the government level, both national and local, and what is enacted in the school/classroom level. By doing so, it is hoped that the answers to the research questions may raise important issues that may be of value to policymakers and practitioners, and allow them to understand the issues and challenges in implementing the new policies.

### **Research Design**

Based on the nature of the research questions, the researcher used a qualitative research methodology for finding the answers

(Robson, 2002; Strauss and Corbin, 1998). Within this methodology, a case study was viewed as a well-known research approach (Robson, 2002) in order to establish detailed information (i.e. in-depth study) on how and why the events took place (Yin, 2003). As not much is known about this contemporary event, a case study approach is deemed as most suitable in discovering what was going on in the classrooms in relation to the new teaching-learning activity and assessment policy practices. In addition, it is typically context-bounded (Stake, 2000; Yin, 2003), in that it is bounded within the Indonesian context. As a consequence of this, a case study of policy formulation and implementation of the new assessment, integrated with the new 2004 curriculum/revised 2006-KTSP, from relevant experienced people judged as rich sources of information (Yin, 2003) were conducted to explore the contemporary event for the purpose of understanding the new policies (Yin, 2003). Thus, the nature of this study was an exploratory single case study across a number of sites (Denscombe, 2003; Robson, 2002; Yin, 2003).

### **Site Selection**

With reference to the purpose of this study, it was not feasible to research the policy implementation in all the provinces within the Republic of Indonesia. For this reason, the researcher selected only one province within

which the important powerful elites, policymakers of the Department of National Education, existed. This led the researcher to choose DKI Jakarta, the capital city of the Republic of Indonesia, as the main location for the field study. Subsequently, the site selection for the local education authority (LEA) and the sampled schools were also in Jakarta. In this sense, there were four sampled schools: three of them (SMAN P, Q, and R, respectively) were the government's mini-pilot project schools, while the remaining one (SMAN Y) was a self-funded school, functioning as a case-control school. It should be noted that all of the sampled schools have been implementing the 2004 curriculum/revised 2006-KTSP and assessment policies since 2001/2002. The selection was accomplished by considering the time effectiveness (i.e. the available time for gathering various kinds of data through multiple methods of data collection) as well as the existing financial resources.

### **Method of Sampling**

For the purpose of this case study, samples were selected on the basis of purposeful sampling (Denscombe, 2003; Robson, 2002) in order to 'meet multiple interests and needs, flexibility and triangulation' as well as 'to take advantage of the unexpected during field work' (Patton, 2002, p. 243). With reference to the nature of this study, five out of six different government institutions, under the

Department of National Education, were sampled in the main study, which was carried out between July and September 2004 and 2005, respectively. They were the Office of Research and Development, the Examination Centre, the Curriculum Centre, and the Directorate for Senior General Secondary School (at the national level) and the Local Education Authority (at the provincial level). Then, each director of these government institutions, judged as an experienced rich-information person, was also sampled. All of them were very influential people at the national level. However, it should be noted that it was quite difficult to know that the chosen samples were actively participating in the formulation of the new assessment and curriculum policies. In addition, four out of five senior general secondary public schools were sampled. Furthermore, from each of the sampled schools, the head-teacher, two chemistry teachers (who were chosen due to having similar background with the researcher) and a group of six science students (three boys and three girls) at grade-12 (assumed to have so long practiced that they might provide in-depth information) were also sampled (Yin, 2003). It should be noted that the chemistry teachers were chosen by their head-teacher to participate in the interviews. This was also true for the science students. They were chosen by their chemistry teacher to participate in the interviews. The sampling strategy used in this study was that each respondent from the

different data sources (i.e. the policymakers, head teachers, chemistry teachers and the science students) had different roles and positions. Such a strategy allowed the researcher to gain access to sources that may represent different interests and needs about the new policy implementation. This meant that the researcher's flexibility during the 2004 and 2005 studies played an important role in accommodating their differing interests and needs.

### **Units of Analysis**

With reference to the research questions in this study as well as the nature of this study, the five government institutions as well as the four sampled schools were treated as the unit analysis of data collection sources. Following that, relevant people from those institutions were selected as the unit of analysis for the research design (Yin, 2003).

### **Data Sources, Methods of Data Collection and Data Analysis**

This case study used one of its main strengths, namely, the use of multiple sources of evidence and multiple methods of data collection, in the process of generating the intended data (see for example, Denscombe, 2003; Patton, 2002; Robson, 2002; Stake, 2000; Yin, 2003, among others). In this sense, being aware of his role as an instrument of the qualitative inquiry, the researcher self-prepared

with good quality interviews set-up by De Jong and Kim (1998) (in order to social-interact ethically during the interview process). Prior to the interview process with the policymakers and on the first day of visiting the schools, the researcher introduced himself, explained the purpose of the study in relation to the new policy implementation, the sample of the study (i.e. the type and the number of sample), the methods used for data collection and the allocated time. In addition, for the purpose of classroom observations, the researcher prepared, in advance, the intended format (Harding and Meldon-Smith, 2000; Sharman et al., 2004). Moreover, research field-notes were used as one of the data sources for recording progress during the study. In this study, the type of data sources and methods that were employed was determined by the nature of the research questions to be answered. Once all data was collected, these were subsequently analyzed by using content and discourse analyses.

### **DISCUSSION OF THE FINDING**

In principle, there was a commonality amongst the three groups of the grade-12 science students concerning the implementation of the new 2004 curriculum/ revised 2006 KTSP, including assessment, policies. Although they seemed to recognise

that to be independent and active, in turn, competent, they had to master on their own learning. However, it was likely to be quite hard to implement the new policies. From their perspective, they were unlikely familiar with what and how the new required knowledge, skills, and dispositions should be implemented. Moreover, the lack of their teachers' practical knowledge base and the lack of the various resources increased the difficulty in implementing the new policies. As a consequence, their school's/teachers' strategy was likely to adopt the traditional tests of 'block examinations', followed by the enrichment and remediation programmes. Unfortunately, their approach to reach their goals was likely to affect the low achieving science students. Their interviews' responses could be reflected as follows:

The new curriculum policy asked students to be independent learners ... they had to search additional articles for further information (P1a) ... asked them to be active in exploring what should be learned (W1a) ... according to the intended competency (W2a). Besides, cognitive, psychomotor and affective aspects were measured (P2a) ... independently (P1a). ... There was also mastery learning and ... enrichment and remediation for those who were competent and failed, respectively, in the previous paper-and-pencil tests of 'block examinations'. This exam was based on an agreed competency standard per subject

(W2a). ... The implication was that the students' learning became overload for those who took the remediation programme (W1a) (The science students of School A, from their original transcript, 2005).

This group of six science students was likely to view that the new curriculum policy practice asked them to become independent and active learners. The end purpose was to provide them with the predicate as masters of learning, after passing on the agreed pass/fail criterion. In order to achieve this goal, there were the enrichment and remediation programmes embedded with the paper-and-pencil tests of 'block examinations', as the school's formal assessment mechanism. However, the assessment methods applied were likely to mostly affect the low achieving students' learning.

The new curriculum policy was introduced to this school to prepare the students to be ready working in industries (P1b) ... In this sense, they were expected to be competent (P2b) ... and became active learners in exploring what should be learned (W1b). However, the new policy was new for us ... we were still in an adaptation phase ... In this respect, our teachers acted as facilitators of the students' learning. They only described new topics in a general way ... and the students were asked to explore the intended knowledge based on their own ways ... Then, we presented our topics. This was quite hard (P3b). ... This led to an implication on the

students who were lazy. They would stay behind those who were hard-working (P2b) (The science students of School B, from their original transcript, 2005).

Although this group of six science students was likely unfamiliar with the new initiative, they perceived that the new curriculum initiative asked them to be active and competent in order to be ready in their future work. However, this was likely to be quite hard. This was because their teachers, as facilitators of their learning, taught only in a common way. They, themselves, explored the knowledge in their own way and then presented it. The implication was likely to be felt by the low achievers.

With the new curriculum policy, students became active (W1d) ... in searching for further information about new topics. In this sense, teachers acted as facilitators (W2d). ... This was done by making theory and practice in a balance to prepare the students for their future life (P1d) ... which was independent (P2d). In the daily life, an application of our skills was, especially, necessary. By doing so, there would be a kind of linking between what should be learned and what should be known outside schools. The implication was that we would have motivation to learn. However, in reality, we had not felt this implication. The implementation of the new curriculum policy had not been well-organised. ... For example, the school had not provided adequate facilities, teaching

materials and equipments (W2d). ... Moreover, we, sometimes, learned using the old system, such as note-taking (P2d). This might be because we had not got used to learning the new system. The influence of the old system was so deep that it was quite difficult to adapt the new system (W2d). ... Above all, our teachers had no idea on how to implement the new curriculum and assessment policies and how to serve the students' needs (W2d) (The science students of School D, from their original transcript, 2005).

This group of six science students was likely to recognise the importance of understanding of and the implication on what and how they should learn in the context of the implementation of the new curriculum and assessment policies. However, in fact, there were constraints in implementing the new policies. The lack of the chemistry teacher's knowledge about the issues on implementing the new curriculum and assessment policies combined with the lack of a wide range of adequate resources led the students' teachers to the practice of the traditional teaching method.

"We hardly know anything about what students think about educational change, because no one ever asks them" (Fullan, 1991, p.182). This means that little is known about how students view educational reform. In this study, the science students were unlikely



familiar with what and how to implement the new knowledge and skills. Drawing on Oerlemans and Vidovich's (2005) study of students' perceptions of educational change, one of the emerging themes was associated with disempowerment of students. In this sense, they were treated as the 'object' of policy initiatives (ibid). They are usually excluded from the process and decision making associated with educational change (Fullan, 2001). Within this study, the science students received both the mandated policies on 'block examinations' and the remediation programme. They merely acted as the object of the curriculum reform. It should be noted that in order for educational change to be successful in promoting students' learning, students must be involved and encouraged to be active participants (Fullan, 1992). This is conducted 'through engagement with others, through dialogue and other social processes' that enable students to develop a shared meaning of learning (Lodge, 2005, p.132). To sum up, the relationship amongst students through communicating and sharing the construction of knowledge, for the purpose of new understandings, reflect student involvement in educational reform. This constitutes the role of students within the context of educational reform.

To fully understand students' role in educational reform, it is important to analyse their involvement in the context of school

improvement (Lodge, 2005). In this respect, there are four ideal types of student involvement, namely: quality control, students as a source of information, compliance and control, and dialogue (ibid). In terms of the quality control approach, students' voices are employed as information and evidence for judging the quality of the provision of schooling. In this study, the science students were viewed as the passive learners providing feedback for the institutional purpose. In the second approach, students are deemed as both passive learners and a source of information for the improvement purpose. They are excluded from dialogue to develop their understandings of the emerging issues. Within this study, they were not included in the dialogue on what and how to learn the new knowledge and skills. With respect to the compliance-and-control approach, schools acknowledge the active potential of students. This is conducted by acknowledging some account about their rights to be involved in decision making. However, their voices are employed for the institutional purpose. In relation to this study, there was no compliance on the science students' voices. Rather, the sampled schools used the science students' silent voices (i.e., the results of the paper-and-pencil tests of 'block examinations') for the institutional goals. Finally, the dialogue approach views students as active participants in their own learning. In this sense, there is a broad opportunity for students to explore their

ideas and experiences, in turn, to be shared with others. This is conducted on the basis of engaged, open and honest relationships. Within this study, there were likely no intended dialogues between the chemistry teachers and the science students. Instead, there were direct instructions from the chemistry teachers to the science students, before and during the teaching-learning activities (Classroom observations, 2005). In sum, the sampled schools used the science students' silent voices for the institutional goals. They used the silent voices merely as a data source.

To involve students' voices in the broader context of school reform, in turn, school improvement, it is necessary to associate their role with the strategy of student empowerment (Raymond, 2001). In this sense, there are four strategies: students as a data source, students as active respondents through discussion, students as co-researchers through dialogue, and students as researchers through significant voice. Within this study, the science students merely acted as a data source. This reality, then, could be applied to explore the role of student voice within the context of school reform.

To explore the rhetoric and reality of the role of student voice in school reform, there are two (of nine) clusters that need to be politically considered (Fielding, 2001). The first cluster refers to the speaking dimension: *who* is allowed to speak? *To whom* are they allowed to

speak? *What* are they allowed to speak about? *What language* is encouraged/ allowed? (ibid, p.100). The second cluster refers to the listening dimension: *who* is listening? *Why* are they listening? *How* are they listening? (ibid, p.102). Within this study, the science students were kept quiet during the teaching-learning activities. They merely received direct instructions from their chemistry teachers to do their assignments both in their daily notebooks and in the white boards (Classroom observations, 2005).

## CONCLUSION AND RECOMMENDATION

I would argue that the grade-12 science students need to be involved in the decision making process about the ongoing reforms in their schools. They should not be used as the object of reform. Their voices must be heard, not marginalized. This means that in the new 2004 curriculum policy implementation at the school/classroom level, there must be alternative in relation to the mechanism of communication. This further will help shift the power from the chemistry teachers to the grade-12 science students to obtain the balance of power. In addition, the students should have the opportunity to explore their experience through a variety of activities in their rich-resources schools. By doing so, it is likely that they know their schools implement

democratic structures of the teaching-learning process rather than strictly controlled structures, coming from a series of educational bureaucratic layers.

## REFERENCES

- Bowe, R., Ball, S., Gold, A. (1992). *Reforming education and changing schools: Case studies in policy sociology*. London: Routledge.
- Denscombe, M. (2003). *The good research guide for small-scale social research projects (second edition)*. Maidenhead, England: Open University Press.
- Fielding, M. (2001). Beyond the rhetoric of student voice: new departures or new constraints in the transformation of 21<sup>st</sup> century schooling? *FORUM*, 43(2), pp. 100-109.
- Flutter, J and Rudduck, J. (2004). *Consulting pupils: what's in it for schools (p.162)*. London: Routledge Falmer.
- Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change (third ed.)*. New York: Teacher's College Press.
- Fullan, M. (1991). *The new meaning of educational change*. London: Cassell Educational Limited.
- Harding, J and Meldon-Smith, L. (2000). *How to make observations & assessments (second edition)*. London: Hodder & Stoughton.
- Kincheloe, J. L., and McLaren, P. L. (1994). Rethinking critical theory and qualitative research. In Y.S. Lincoln and N. K. Denzin (Eds.), *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage.
- Lodge, C. (2005). From hearing voices to engaging in dialogue: problematising student participation in school improvement. *Journal of Educational Change*, Vol.6, pp.125-146.
- McDonnell, L.M. (1994). Policymakers' views of student assessment. *CSE Technical Report 378*. National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST). Graduate School of Education and Information Studies. University of California, Los Angeles.
- Noyes, A. (2005). Thematic Review: Pupil voice: purpose, power and the possibilities for democratic schooling. *British Educational Research Journal*, 31(4), pp. 533-540.

- Oerlemans, K., and Vidovich, L. (2005). Expert witnesses: voices of significance. *Journal of Educational Change*, Vol.6, pp.363-379.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (third edition). California: Sage Publications, Inc.
- Pusat Kurikulum-Depdiknas.(14 Juli, 2004). *Kurikulum 2004:Kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi kurikulum dan pengelolaan kurikulum* (Bahan untuk pembahasan internal – tidak untuk dipublikasikan). Jakarta
- Raymond, L. (2001). Student involvement in school improvement: form data source to significant voice. *FORUM*, 43(2), pp.58-61.
- Robson, C. (2002). *Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers* (second edition). Blackwell Publishing.
- Stake, R. E. (2000). Case Studies (Chapter 16). In N. K. Denzin and Lincoln, Y.S. *Handbook of qualitative research*. Second edition. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
- Strauss, A. and Corbin, J. (1998) *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*(2<sup>nd</sup> edition). Thousand Oaks, London: Sage Publications, Inc.
- Witjaksono, R. (2007). *Analysis of Policy on Educational Assessment in relation to the Implementation of the New 2004 Curriculum/ Revised 2006 Curriculum (KTSP): A Case Study of Four Senior General Secondary Schools in Jakarta, Indonesia* (Unpublished Doctoral Thesis, 2<sup>nd</sup> Draft). University of London, Institute of Education, School of Curriculum, Pedagogy, and Assessment.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Designs and methods* (third edition). London: Sage Publications, Inc.

# PERBEDAAN KEMAMPUAN SISWA SMP NEGERI DAN SWASTA TERHADAP HASIL UN 2011-2012

Safari

Peneliti Utama di Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud.

E-mail: safari\_puspendik@yahoo.com.

## ABSTRACT

*The objective of this research is to answer the following questions. Is the achievement of the public Secondary School students in the National Final Examination (UN) throughout Indonesia the same with the Private Secondary School students? Is there any difference in the student's achievement between Public and Private Secondary School? The results of the variant analysis are as follows. First, it shows that the students' achievement of the Indonesian language subject of public secondary school (mean 7,89 and SD 0,35) is better than the private secondary school students' (mean 7,81 and SD 0,30). The students' English achievement of private secondary school (mean 6,87 and SD 0,75) is better than the public secondary school students' (Mean 6,80 and SD 0,67). The students' mathematics achievement of public Secondary School (mean 7,53 and SD 0,77) is better than the private secondary school students' (Mean 7,48 and SD 0,90). The students' Science achievement of public Secondary School (mean 7,46 and SD 0,65) is better than the private secondary school students' (mean 7,40 and SD 0,73). Second, there is no significant difference between the public and private secondary school students' achievement; Indonesian Language (P-value = 0,277), English (P-value = 0,688), Mathematics (P-value = 0,828), and Science (P-value = 0,694).*

**Keywords:** *students' achievement, subject, secondary school, national final examination (UN)*

## **ABSTRAK**

*Tujuan utama studi ini adalah menjawab pertanyaan berikut. Apakah tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS untuk mata pelajaran yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia adalah sama, dan Apakah terdapat perbedaan tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN. Berdasarkan hasil analisis varian satu jalur diperoleh hasil seperti berikut. Pertama, klasifikasi kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah seperti berikut. Kemampuan Bahasa Indonesia pada siswa SMPN (Mean 7,89 dan SD 0,35) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (mean 7,81 dan SD 0,30). Kemampuan Bahasa Inggris pada siswa SMPS (mean 6,87 dan SD 0,75) adalah lebih baik daripada siswa SMPN (mean 6,80 dan SD 0,67). Kemampuan Matematika pada siswa SMPN (mean 7,53 dan SD 0,77) adalah lebih baik dari pada siswa SMPS (mean 7,48 dan SD 0,90). Kemampuan IPA pada siswa SMPN (mean 7,46 dan SD 0,65) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (mean 7,40 dan SD 0,73). Kedua, perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN, Bahasa Indonesia (P-value= 0,277), Bahasa Inggris (P-value= 0,688), Matematika (P-value=0,828), dan IPA (P-value= 0,694).*

**Kata kunci:** *kemampuan siswa, mata pelajaran, SMP, UN.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang dan Masalah**

Banyak orangtua murid yang bingung dalam memilih sekolah untuk anaknya karena terdapat banyak perbedaan antara Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) di Indonesia. Inilah yang membuat beberapa orangtua murid mempertimbangkannya sebelum memilihkan sekolah untuk anaknya. Ada beberapa hal pokok yang menjadi pemikiran para orangtua murid. Di antaranya seperti berikut ini. Pertama, tentang biaya. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk SD dan SMP negeri biayanya adalah gratis, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). RSBI memungkinkan pihak sekolah untuk meminta bantuan operasional yang lebih mahal kepada orangtua murid karena sekolah dituntut memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas demi proses pembelajaran. Adapun SMPS biasanya biayanya lebih mahal dan di atas rata-rata. Hal ini dikarenakan sekolah swasta memiliki visi dan misi tersendiri. Sekolah swasta memiliki standar pendidikan yang berbeda-beda bagi murid-muridnya.

Kedua, tentang pergaulan. Siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri memiliki lebih banyak perbedaan. Dalam hal agama misalnya, keragaman keyakinan bisa ditemukan di sekolah

negeri. Tidak seperti di sekolah swasta yang dikhususkan untuk keyakinan tertentu, siswa-siswinya sehari-hari hanya bergaul dengan teman-teman dari kalangan keyakinan yang sama sehingga mereka kurang memahami orang-orang dengan keyakinan yang berbeda. Selain itu, latar belakang keluarga siswa-siswi sekolah negeri juga lebih beragam. Berbeda dengan siswa-siswi sekolah swasta yang rata-rata berasal dari keluarga berada karena biaya masuk sekolah swasta tergolong tinggi. Sekolah negeri lebih unggul dalam hal mengajarkan anak tentang bagaimana menerima banyaknya perbedaan dalam hal agama dan kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa sekolah swasta, ada yang mayoritas diisi oleh siswa-siswa dengan ras tertentu. Hal itu membuat siswa-siswa di sekolah lain yang tidak berasal dari ras yang sama menjadi enggan untuk bergaul dengan mereka, karena menganggap bahwa mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang dari ras yang berbeda. Sementara siswa-siswa ras tersebut juga enggan bergaul dengan siswa-siswa sekolah lain yang berbeda ras karena mereka takut akan dikucilkan dengan adanya perbedaan sehingga mereka lebih memilih untuk bergaul dengan sesamanya saja. Hal inilah yang menimbulkan kesalahpahaman sehingga sekolah swasta terkesan eksklusif dan enggan membaaur dengan masyarakat.

Ketiga, tentang fasilitas. Jika menyinggung soal fasilitas, sekolah negeri dan swasta tentu juga berbeda. Dengan biaya yang tergolong standar dari pemerintah, sekolah negeri masih kalah jika dibandingkan dengan sekolah swasta yang biayanya tidaklah murah. Biaya sekolah berpengaruh cukup besar dalam pemberian fasilitas pembelajaran. Fasilitas kelas yang menunjang seperti air conditioner, LCD projector, laptop dan lainnya tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekolah negeri tidak bisa secara penuh memberikan fasilitas ini kepada seluruh siswanya. Sedangkan untuk meminta bantuan dari orangtua murid dilarang pemerintah karena dianggap memberatkan masyarakat. Kecuali bagi sekolah RSBI dengan alasan yang sudah saya sebutkan di atas. Berbeda dengan sekolah swasta yang memiliki cukup biaya untuk memberikan fasilitas yang berkualitas bagi seluruh siswa-siswinya. Tidak hanya fasilitas di dalam kelas, melainkan juga fasilitas luar kelas seperti lapangan olahraga, stadion basket milik pribadi, serta bus sekolah.

Keempat, tentang tenaga pengajar. Tenaga pengajar atau guru pada sekolah negeri maupun sekolah swasta bisa dibilang kurang lebih sama. Rata-rata tenaga pengajar sama-sama memiliki latar belakang pendidikan minimal S1, beberapa ada yang sudah S2. Yang membedakan adalah perhatian para pengajar terhadap anak didiknya. Tidak bisa dipungkiri, jumlah siswa yang belajar di sekolah negeri jauh

lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang belajar di sekolah swasta. Jika dalam satu kelas sekolah negeri memiliki 40 siswa, maka sekolah swasta hanya 20-30 siswa. Belum lagi jumlah kelas di sekolah negeri yang juga lebih banyak daripada jumlah kelas di sekolah swasta. Jumlah siswa berpengaruh signifikan terhadap perhatian guru.

Di samping keempat hal di atas, masih banyak perbedaan yang lainnya yang tidak dipaparkan di sini. Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah negeri maupun swasta, semua kembali kepada orangtua dan anak sendiri. Di manapun nantinya orangtua akan menyekolahkan anaknya, semua tergantung kepada anak itu sendiri. Jika ia memiliki kepribadian yang kuat serta semangat belajar tinggi, maka ia akan sukses di manapun ia bersekolah. Sekarang masalah yang muncul adalah apakah hasil UN siswa SMPN selalu lebih tinggi daripada hasil UN siswa SMPS? Apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa SMPN dan siswa SMPS terhadap hasil UN?

### **Rumusan Masalah**

Dari berbagai uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut. **Pertama**, apakah tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS untuk mata pelajaran yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia



adalah sama? **Kedua**, apakah terdapat perbedaan tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN? Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan tujuan utama dalam penelitian ini.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah seperti berikut ini. **Pertama**, untuk menentukan apakah tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS untuk mata pelajaran yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia adalah sama. **Kedua**, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN.

### **KAJIAN LITERATUR**

Kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap mata pelajaran yang di-UN-kan yaitu mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam tergantung pada tingkat penguasaan materi yang telah diajarkan guru di sekolah. Karena kemampuan merupakan kemahiran individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Sanjaya, 2006: 70). Di samping itu, kemampuan merupakan rahmat insaniah yang

dapat digolongkan sebagai rahmat umum karena seluruh potensi ini telah dianugerahkan Tuhan secara imanen dan inharen ketika manusia belum lahir ke dunia (Sinarno, 2010: 11).

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal UN sangat berkaitan erat dengan tingkat kesukaran butir soal yang dikerjakannya. Karena tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 - 1,00 (Aiken (1994: 66). Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki TK= 0,00 artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar soal dan bila memiliki TK= 1,00 artinya bahwa siswa menjawab benar soal. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor soal. Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh warga belajar/siswa pada butir soal yang bersangkutan dinamakan tingkat kesukaran butir soal itu. Rumus ini dipergunakan untuk soal objektif. Rumusnya adalah seperti berikut ini (Nitko, 1996: 310).  
Tingkat kesukaran= (jumlah siswa yang menjawab benar butir soal) : (jumlah siswa yang mengikuti tes).

Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya untuk keperluan ujian semester dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, untuk keperluan seleksi dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi/sukar, dan untuk keperluan diagnostik biasanya dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah/mudah.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan tingkat kesukaran soal itu. Sebagai pedoman umum, klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti berikut ini. 0,00 - 0,30 soal tergolong sukar. 0,31 - 0,70 soal tergolong sedang. 0,71 - 1,00 soal tergolong mudah.

Tingkat kesukaran butir soal dapat mempengaruhi bentuk distribusi total skor tes. Untuk tes yang sangat sukar ( $TK = < 0,25$ ) distribusinya berbentuk positif skewed, sedangkan tes yang mudah (berisi soal dengan  $TK = > 0,80$ ) distribusinya berbentuk negatif skewed.

Tingkat kesukaran butir soal memiliki 2 kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran (Nitko, 1996: 310-313). Kegunaannya bagi guru adalah: (1) sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka, (2) memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal

yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran adalah: (a) pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, (b) tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah, (c) memberi masukan kepada siswa, (d) tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias, (e) merakit tes yang memiliki ketepatan data soal.

Di samping kedua kegunaan di atas, dalam konstruksi tes, tingkat kesukaran butir soal sangat penting karena tingkat kesukaran butir dapat: (1) mempengaruhi karakteristik distribusi skor (mempengaruhi bentuk dan penyebaran skor tes atau jumlah soal dan korelasi antarsoal), (2) berhubungan dengan reliabilitas. Menurut koefisien alfa dan KR-20, semakin tinggi korelasi antarsoal, semakin tinggi reliabilitas (Nunnally, 1981: 270-271).

Tingkat kesukaran butir soal juga dapat digunakan untuk memprediksi alat ukur itu sendiri (soal) dan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru. Misalnya satu butir soal termasuk kategori mudah, maka prediksi terhadap informasi ini adalah seperti berikut. (1) Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. (2) Sebagian besar siswa menjawab benar butir soal itu; artinya bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi yang ditanyakan.

Bila suatu butir soal termasuk kategori sukar, maka prediksi terhadap informasi ini adalah seperti berikut. (1) Butir soal itu

"mungkin" salah kunci jawaban.(2) Butir soal itu mempunyai 2 atau lebih jawaban yang benar. (3) Materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya, sehingga kompetensi minimum yang harus dikuasai siswa belum tercapai. (4) Materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan mempergunakan bentuk soal yang diberikan (misalnya meringkas cerita atau mengarang ditanyakan dalam bentuk pilihan ganda). (5) Pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang.

Namun, analisis secara klasik ini memang memiliki keterbatasan, yaitu bahwa tingkat kesukaran sangat sulit untuk mengestimasi secara tepat karena estimasi tingkat kesukaran dibiarkan oleh sampel (Haladyna, 1994: 145). Jika sampel berkemampuan tinggi, maka soal akan sangat mudah ( $TK = > 0,90$ ). Jika sampel berkemampuan rendah, maka soal akan sangat sulit ( $TK = < 0,40$ ). Oleh karena itu memang merupakan kelebihan analisis secara Item Response Theory (IRT), karena IRT dapat mengestimasi tingkat kesukaran soal tanpa menentukan siapa pesertanya (invariance). Dalam IRT, komposisi sampel dapat mengestimasi parameter dan tingkat kesukaran soal tanpa bias.

Dari berbagai uraian teori di atas muncullah permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, apakah siswa SMPN menjawab soal-soal UN untuk setiap mata pelajaran adalah lebih mudah daripada siswa SMPS? Apakah

terdapat perbedaan tingkat kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode survei. Dasar penggunaan metode survei adalah disesuaikan dengan tujuan utama penelitian ini di antaranya adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual berdasarkan data penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah semua siswa SMPN dan SMPS yang mempelajari semua bidang studi di kelas sembilan, sedangkan sampelnya adalah siswa SMPN dan SMPS yang mempelajari bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA yang di-UN-kan. Alasan pemilihan sampel adalah keempat mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang di-UN-kan, sedangkan mata pelajaran selain itu dijadikan sebagai ujian sekolah. Data dalam penelitian ini berbentuk skor tes yang dijawab siswa SMPN dan SMPS di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah siswa SMPN yang mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2011/2012 adalah 2428788 siswa yang belajar di 22062 SMPN dan SMPS 1269057 siswa yang belajar di 25323 SMPS.

Jumlah siswa setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah SMPN dan SMPS serta Peserta Ujian Nasional Tahun 2011/2012 di 33 Provinsi

No.	Provinsi	Jml SMPN	Jml Siswa SMPN	Jml SMPS	Jml Siswa SMPS
1.	DKI Jakarta	362	77986	917	54342
2.	Jawa Barat	2206	398557	4214	261731
3.	Jawa Tengah	2038	331279	2666	175364
4.	DI Yogyakarta	250	33986	260	14141
5.	Jawa Timur	2000	316373	4971	230130
6.	Aceh	841	70111	372	12504
7.	Sumatera Utara	1167	138013	1875	104474
8.	Sumatera Barat	717	71225	354	12719
9.	Riau	729	60823	729	28607
10.	Jambi	579	39380	318	9592
11.	Sumatera Selatan	788	83671	749	32624
12.	Lampung	641	72110	1138	51428
13.	Kalimantan Barat	742	45980	480	17428
14.	Kalimantan Tengah	545	24713	205	6090
15.	Kalimantan Selatan	604	37366	288	11153
16.	Kalimantan Timur	512	41459	294	12059
17.	Sulawesi Utara	422	26456	263	9113
18.	Sulawesi Tengah	613	32628	319	7339
19.	Sulawesi Selatan	1101	105093	889	30645
20.	Sulawesi Tenggara	605	36337	169	3829
21.	Maluku	378	22232	217	8081
22.	Bali	251	43224	156	15746
23.	NTB	613	53772	816	24905
24.	NTT	765	53854	393	24086
25.	Papua	349	19393	148	7608
26.	Bengkulu	387	26723	69	1972
27.	Maluku Utara	301	13931	186	5271
28.	Bangka Belitung	148	12669	66	3010
29.	Gorontalo	298	13647	66	1785
30.	Banten	554	85082	1426	79645
31.	Kepulauan Riau	193	15769	112	4737
32.	Sulawesi Barat	218	15868	129	3812
33.	Papua Barat	145	9078	69	3087
	Nasional	22062	2428788	25323	1269057

Sumber: Puspendik, Balitbang Kemdikbud 2012

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian satu jalur. Analisis varian dipergunakan untuk menghitung perbedaan hasil UN pada sertiap mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa SMPN dan SMPS. Agar hasil analisis penelitian ini dapat diperoleh secara akurat, maka semua data dalam penelitian ini diolah atau dianalisis dengan mempergunakan program SPSS 20.00.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bahasa Indonesia

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah sama walaupun nilai standar deviasinya tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa pada UN Bahasa Indonesia SMPN dan SMPS Tahun Pelajaran 2011/2012 di 33 Provinsi

SMPN-SMPS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. SMPN	33	7,8939	0,35282	0,06142
2. SMPS	33	7,8055	0,30144	0,05247

Berdasarkan data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa kemampuan Bahasa

Indonesia pada siswa SMPN (Mean 7,89 dan SD 0,35) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,81 dan SD 0,30).

Tabel 3 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 3 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,296	1	64	,589

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,129	1	,129	1,200	,277
Within Groups	6,891	64	,108		
Total	7,020	65			

Tabel 4 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMP terhadap hasil UN Bahasa Indonesia 2012 adalah tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMPN dan SMP terhadap hasil UN Bahasa Indonesia (P-value= 0,277).

## 2. Bahasa Inggris

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah sama walaupun nilai standar deviasinya tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa pada UN Bahasa Inggris SMPN dan SMPS Tahun Pelajaran 2011/2012 di 33 provinsi

SMPN-SMPS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. SMPN	33	6,8012	0,67145	0,11688
2. SMPS	33	6,8721	0,75420	0,13129

Berdasarkan data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa kemampuan Bahasa Inggris pada siswa SMPS (Mean 6,87 dan SD 0,75) adalah lebih baik daripada siswa SMPN (Mean 6,80 dan SD 0,67).

Tabel 6 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 6 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,209	1	64	,649

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,083	1	,083	,163	,688
Within Groups	32,629	64	,510		
Total	32,712	65			

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMP terhadap hasil UN Bahasa Inggris 2012 adalah tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN Bahasa Inggris ( $P\text{-value} = 0,688$ ).

### 3. Matematika

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah sama walaupun nilai standar deviasinya tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa pada UN Matematika SMPN dan SMPS Tahun Pelajaran 2011/2012 di 33 Provinsi

SMPN-SMPS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. SMPN	33	7,5279	0,76983	0,13401
2. SMPS	33	7,4830	0,89505	0,15581

Berdasarkan data dalam tabel 8 menunjukkan bahwa kemampuan matematika pada siswa SMPN (Mean 7,53 dan SD 0,77) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,48 dan SD 0,90).

Tabel 9 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen ( $\text{Sig.} > 0,05$ ).

Tabel 9 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,746	1	64	,391

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,033	1	,033	,048	,828
Within Groups	44,600	64	,697		
Total	44,633	65			

Tabel 10 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMP terhadap

hasil UN Matematika 2012 adalah tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMPN dan SMPsterhadap hasil UN Matematika (P-value= 0,828).

#### 4. IPA

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah sama walaupun nilai standar deviasinya tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa pada UN IPA SMPN dan SMPS Tahun Pelajaran 2011/2012 di 33 Provinsi

SMPN-SMPS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. SMPN	33	7,4627	0,64545	0,11236
2. SMPS	33	7,3958	0,72934	0,12696

Berdasarkan data dalam Tabel 11 menunjukkan bahwa kemampuan IPA pada siswa SMPN (Mean 7,46 dan SD 0,65) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,40 dan SD 0,73).

Tabel 12 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 12 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,247	1	64	,621

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,074	1	,074	,156	,694
Within Groups	30,353	64	,474		
Total	30,427	65			

Tabel 13 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMPsterhadap hasil UN IPA 2012 adalah tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMPN dan SMPsterhadap hasil UN IPA (P-value= 0,694).

Berdasarkan hasil analisis keempat mata pelajaran yang di-UN-kan di atas bahwa kemampuan siswa yang belajar di SMPN dan SMPS adalah sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan siswa yang belajar di SMPN dan SMPS. Kemampuan siswa di kedua sekolah dalam mengerjakan soal-soal UN sangat berkaitan erat dengan tingkat kesukaran butir soal yang dikerjakannya. Karena tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat

kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 - 1,00 (Aiken (1994: 66). Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki  $TK = 0,00$  artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar soal dan bila memiliki  $TK = 1,00$  artinya bahwa siswa menjawab benar soal. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor soal. Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh siswa pada butir soal yang bersangkutan dinamakan tingkat kesukaran butir soal itu.

Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya untuk keperluan UN dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, untuk keperluan seleksi dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi/sukar, dan untuk keperluan diagnostik biasanya dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah/mudah. Jadi pada prinsipnya, semakin tinggi kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru, semakin tinggi pula peluang menjawab benar soal pada setiap bidang studi yang diujikan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan semua uraian di atas, hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya temuan-temuan dan saran seperti berikut ini.

**Pertama**, klasifikasi kemampuan siswa SMPN dan SMPS adalah seperti berikut. Kemampuan Bahasa Indonesia pada siswa SMPN (Mean 7,89 dan SD 0,35) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,81 dan SD 0,30). Kemampuan Bahasa Inggris pada siswa SMPS (Mean 6,87 dan SD 0,75) adalah lebih baik daripada siswa SMPN (Mean 6,80 dan SD 0,67). Kemampuan Matematika pada siswa SMPN (Mean 7,53 dan SD 0,77) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,48 dan SD 0,90). Kemampuan IPA pada siswa SMPN (Mean 7,46 dan SD 0,65) adalah lebih baik daripada siswa SMPS (Mean 7,40 dan SD 0,73).

**Kedua**, perbedaan kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa SMPN dan SMPS terhadap hasil UN, Bahasa Indonesia (P-value= 0,277), Bahasa Inggris (P-value= 0,688), Matematika (P-value=0,828), dan IPA (P-value= 0,694).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada tiga saran penting seperti berikut ini. **Pertama**, kepada para orangtua murid agar mengecek langsung serta mengenali kelebihan dan



kelemahan sekolah yang hendak dituju. Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah negeri maupun swasta, semua kembali kepada orangtua dan anak sendiri. Di manapun nantinya orangtua akan menyekolahkan anaknya, semua tergantung kepada anak itu sendiri. Jika ia memiliki kepribadian yang kuat serta semangat belajar tinggi, maka ia akan sukses di manapun ia bersekolah. **Kedua**, kepada guru khususnya guru yang mengajar mata pelajaran yang di-UN-kan baik yang mengajar di SMPN maupun di SMPS perlu memberi contoh dan praktik yang konkret yang diprioritaskan pada materi dengan daya serap UN yang masih rendah walaupun jumlah siswa yang belajar di sekolah negeri jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang belajar di sekolah swasta. **Ketiga**, kepada para siswa kelas 9 SMP baik sekolah negeri maupun swasta yang sedang mempersiapkan ujian perlu meningkatkan kemampuan khususnya materi yang terdapat di dalam daya serap UN yang rendah. Selamat belajar!

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, Lewis R. (1994). *Psychological Testing and Assessment*, (Eighth Edition). Boston: Allyn and Bacon.
- Haladyna, Thomas M. (1994). *Developing and Validating Multiple-Choice Test Items*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Nitko, Anthony J. (1996). *Educational Assessment of Students*, Second Edition. Ohio: Merrill an imprint of Prentice Hall Englewood Cliffs.
- Nunally, Jum C. (1978). *Psychometric Theory*, Second Edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Sinamo, Jansen. 2010. *8 Etos Keguruan*. Bogor : Grafika Mardi Yuana.

# Pengujian Berimbang : Refleksi dan Tinjauan Kritis dari Perspektif Alqur-an

Syamsir Alam

Pengajar pada Program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Fakultas Pascasarjana, UHAMKA

E-mail: E-mail: samsir\_abdullatif@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*This article attempts to analyze the current assessment policy and practice and its impact on educational quality, particularly student learning. Today, schools are no longer viewed as places where some succeed at learning while other tumble into inevitable failure. Rather, they have become places where all students are expected to meet pre-specified and increasingly rigorous academic achievement standards. The vision of balanced assessment system proposed in this piece is believed to be consistent with the message of Qur-an as noted at (2:286); it is therefore surely able to help schools achieve their noble mission in question. The new assessment policy that manages the procedure for graduating and certifying students a long with its advantages and shortcomings is also discussed.*

**Keywords:** *student learning, test fairness, Balanced Assessment System*

## **ABSTRAK**

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengujian yang ada saat ini dan penerapannya, serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan, khususnya pembelajaran siswa. Akhir-akhir ini, sekolah tidak lagi dipandang hanya sebagai wahana belajar di mana siswa yang sudah ditakdirkan memiliki kecerdasan tinggi akan dapat dengan mudah lulus (berhasil), sedangkan sejumlah siswa lainnya karena berbagai keterbatasan akan mengalami kegagalan. Saat ini, sekolah mengemban amanat untuk membantu semua siswa agar dapat berhasil mencapai standar atau ekspektasi dalam pembelajaran yang ditetapkan. Pandangan terhadap sistem pengujian berimbang yang diajukan dalam artikel ini telah sesuai dengan pesan yang ada dalam Al-Quran (2:286); sehingga tentu dapat membantu sekolah untuk mencapai misi mulia sekolah tersebut. Artikel ini juga membahas kebijakan pengujian baru yang mengatur prosedur kelulusan dan pemberian penghargaan kepada siswa sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki siswa.*

**Kata kunci:** *pembelajaran siswa, keadilan, Sistem Pengujian Berimbang*

## PENDAHULUAN

*“On no soul doth Allah Place a burden greater Than it can bear. It gets every good that it earns, And it suffers every ill that it earns,” (Al-Baqarah, ayat 286).*

Dalam bulan Ramadhan yang lalu setiap insan beriman dianjurkan untuk dengan jujur mengevaluasi perilaku beragama dan kehidupan sosial yang dikerjakan selama sebelas bulan terakhir. Evaluasi dan refleksi secara *individual* tentu sudah dikerjakan karena jikasampai dilupakan, apalagi dengan sengaja dilewatkan maka kualitas ibadah puasa yang sudah dikerjakan selama satu bulan itu hasilnya akan menjadi kurang sempurna. Namun dalam urusan kemasyarakatan (ummat), kita sering mengabaikannya. Kita sering *taken for granted* menyerahkan urusan kemasyarakatan pada pemerintah. Berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat seringkali diterima begitu saja tanpa sikap kritis. Islam sudah memberikan tuntunan, imam dalam sholat saja apabila melakukan kesalahan harus diingatkan dan dikoreksi. Karenanya, kita sebagai warga negara bertanggung jawab semestinya didorong untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk menganalisis *collateral effects* dari implementasi kebijakan itu.

Tulisan ini sengaja disusun untuk maksud terakhir, yaitu sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab dan sebagai upaya membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan, khususnya kebijakan pengujian pendidikan, yang meliputi ujian nasional dan sekolah.

Tulisan ini merupakan tinjauan kritis dan bersifat naratif, yang sumberutama idenya dijiwai kitab Alqur-an. Untuk memenuhi kaedah penulisan ilmiah, penulis melengkapinya dengan sejumlah bahan yang merupakan hasil studi terhadap kebijakan penilaian pendidikan termasuk hasil ‘meta analisis’ atas sejumlah laporan penelitian tentang efektivitas *high-stake examinations* dan penilaian formatif yang dilakukan sejumlah peneliti sebelumnya. Bahan-bahan itu tentunya sangat relevan dan menjanjikan; dan karenanya akan dapat membantu memperluas wawasan pembaca serta menginspirasi pengelola dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam upayanya untuk mendapatkan solusi alternatif terhadap berbagai persoalan penilaian pendidikan yang sedang dihadapi negeri ini.

## KAJIAN LITERATUR

### Penilaian dan Akuntabilitas

Kita menyaksikan bahwa masyarakat sudah semakin memahami peran hakiki sekolah terutama yang berhubungan dengan penilaian

pendidikan. Sekolah bagi sebagian masyarakat bukan lagi dipandang hanya sebagai wahana belajar dan tempat penyeleksian, di mana siswa yang sudah ditakdirkan memiliki kecerdasan tinggi akan dapat dengan mudah lulus (berhasil), sedangkan sejumlah siswa lainnya karena berbagai keterbatasan akan mengalami kegagalan. Praktik penilaian semacam itu ternyata hanya akan menghasilkan kelompok pemenang dan pecundang (losers). Beberapa di antara siswa yang sukses pada tahapan awal itu dapat terus meningkatkan karir pendidikannya seiring dengan pertumbuhan fisik dan psikologis; sedangkan siswa yang gagal biasanya akan tertinggal atau bahkan sengaja ditinggalkan.

Misi sekolah sudah berubah. Sekarang sekolah tidak lagi berfungsi sebagai lembaga *penyortir* guna mengelompokkan siswa yang pandai dan kurang pandai; sebaliknya, sekolah mengemban amanat untuk membantusemua siswa (secara indiskriminatif) agar dapat berhasilmencapai standar atau ekspektasi dalam pembelajaran yang ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan Stiggins (2007), "Schools have become places where all students are expected to meet pre-specified and increasingly rigorous academic achievement standards." Perubahan itu bisaterjadi karena didorong oleh "the accelerating technical and ethnic evolution of our society and the concomitant need for all students to become competent lifelong learners. As a result,

assessment practices historically designed to promote accountability by separating the successful from the unsuccessful now must become practices that support the learning of all students in a variety of ways" (Stiggins, 2007).

### Ujian Sebuah Keniscayaan

Bagi sebagian masyarakat, ujian sering dipandang sebagai sesuatu yang 'mencemaskan' meskipun ujian juga diyakini merupakan sebuah keniscayaan, artinya praktik ujian tidak mungkin untuk dihindari/dikesampingkan. Dalam Islam konsep dan fungsi ujian, bagi penganutnya, sudah sangat dipahami dan bahkan menyatu (embodied) dalam kehidupan keseharian. Allah SWT dalam surat Al Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: 'kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi?" Dalam Islam kualitas dan kedudukan seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas ikhtiar/usaha seseorang dalam mengatasi ujian (hidup) yang dihadapinya. Kedudukan dan derajat seseorang dapat meningkat apabila yang bersangkutan berhasil melalui tahapan-tahapan ujian dengan baik. Sebaliknya di dunia pendidikan, ujian sering dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan dan adakalanya dilihat sebagai ancaman (intimidating). Mendiskusikan ujian (tes) dalam dunia pendidikan tidak selalu dipandang sebagai sebuah kewajaran, apalagi jika akibat dari ujian

itu akan dapat mempengaruhi kedudukan siswa dalam belajar, guru dan kepala sekolah dalam menjalankan profesinya.

Oleh karena itu, dalam menyusun kebijakan ujian, apakah itu ujian nasional (UN), ujian kompetensi guru (UKG), dan ujian yang dikategorikan *high-stake test* lainnya diperlukan kearifan, ibarat menarik sehelai rambut dalam tepung, rambut tidak putus tapi tepungnya juga tidak berserakan. Jadi harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan terbuka sehingga kebijakan ujian itu tidak dipahami secara salah (misunderstood).

### **Kebijakan UN dan UKG**

Degradasi dan deskrapansi kualitas pada hampir semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana diindikasikan dari laporan berbagai 'survey' internasional, seperti TIMSS, PIRLS, PISA, dan lainnya memaksa pemerintah mencari solusi strategis, terukur, dan *time-frame*-nya jelas. Niatnya sudah sangat baik, yaitu ingin segera membenahi dan meningkatkan mutu. Namun, karena sasarannya berjangka pendek maka pilihan rasional bagi pemerintah adalah pada pemanfaatan instrumen kebijakan ujian, dan bukan mencari dan menyelesaikan inti permasalahan (core problem) dengan mengkaji seluruh aspek yang terkait langsung atau pun tidak langsung sebagai penyebab merosotnya mutu pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional meyakini bahwa ujian (UN dan UKG) akan dapat membuat perubahan dan meningkatkan mutu pendidikan. Keyakinan itulah yang membuat kementerian pendidikan terus persisten melaksanakan ke dua jenis ujian itu meskipun harus berhadapan dengan berbagai reaksi yang menyatakan ketidaksetujuan.

Bisa dipahami, praktek ujian dapat mempengaruhi strategi dan meningkatkan motivasi belajar siswa, namun kita juga harus tahu bahwa peningkatan motivasi belajar itu bukanlah merupakan fungsi dari ujian. Peningkatan motivasi belajar siswa seandainya betul terjadi hendaklah dipandang sebagai akibat lanjutan/bawaan (collateral affects) saja. Tapi, harus ditegaskan bahwa *meningkatkan motivasi belajar* siswa bukanlah merupakan fungsi ujian itu sendiri. Seandainya fungsi ujian (tes) ditambahkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, para ahli testing pastinya harus bekerja lebih keras mendapatkan bukti-bukti validitas (validity evidences) guna menjelaskan tujuan itu.

Secara umum pengujian pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu digunakan untuk merekam hasil pengalaman pembelajaran seseorang (siswa) pada suatu jenjang pendidikan, yang biasa disebut dengan tes prestasi belajar (achievement test), dan fungsi tes lainnya adalah untuk memprediksi kemampuan seseorang (kandidat) apabila ia diberikan kesempatan belajar pada program

tertentu di sebuah perguruan tinggi (PT) atau ditempatkan pada suatu jenjang kelas atau pekerjaan tertentu di sebuah perusahaan, disebut “predictive test.”

### **Norm and Criterion-Referenced Measurements**

Perubahan aktivitas penilaian sudah semakin menunjukkan coraknya. Sebagai misal, kita dapat menyaksikan dengan terang terjadinya pergeseran dalam pemanfaatan hasil penilaian, yang sebelumnya diarahkan pada *norm-referenced interpretation* menjadi dengan menggunakan penafsiran yang berbasiskan pada *criterion-referenced measurement*. Pergeseran itu terjadi secara paralel dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat tentang fungsi dan tujuan penilaian. Jika sebelumnya, penilaian digunakan sebagai instrumen untuk sekedar membandingkan siswa berdasarkan prestasi, sekarang kegiatan penilaian sudah diarahkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan substantif, antara lain: apakah hasil penilaian sudah memenuhi standar atau ekspektasi pembelajaran ditetapkan/diharapkan? Dua macam pergeseran penting lainnya menurut Stiggins (2007) adalah “muncul suatu kebutuhan untuk menyeimbangkan praktik penilaian sumatif dengan aplikasi penilaian formatif, dan ujian berskala besar (*large-scale assessment*), seperti UN, PISA, TIMSS, PIRLS dengan penilaian tingkat kelas (*classroom assessments*).” Pergeseran-

pergeseran itu mendapatkan pengakuan secara meluas karena dipengaruhi oleh keberhasilan praktik penilaian formatif dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara makro sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil studi tentang efektivitas penilaian formatif dan penilaian kelas lainnya (Black, P. dan William, D. (1998); Hattie, J. dan Timperley, H. (2007). Perkembangan semacam ini dipandang sebagai sebuah momentum untuk perubahan yang lebih besar; karenanya harus terus didorong. Mungkin yang paling mendasar dari pergeseran itu adalah perubahan bagaimana cara kita menilai kualitas penilaian.

Dalam konteks UN, kementerian pendidikan juga terus berupaya melakukan penyempurnaan meskipun terkesan sedikit terlambat. Pemerintah hendaknya terus didorong untuk melakukan perubahan sistem ujian nasional secara lebih komprehensif dan berimbang. Seharusnya fungsi ujian nasional sebagai penentu kelulusan dipisahkan dari kepentingan pemetaan sehingga kita dapat melihat dengan jelas pergerakan dan pencapaian mutu. Kita saat ini masih menyaksikan *norm-referenced* dan *criterion-referenced interpretations* digunakan secara simultan. Padahal para ahli penilaian banyak yang berpendapat bagaimana mungkin ‘seorang pembantu’ bekerja untuk dua orang majikan secara bersamaan.

Untuk kepentingan kelulusan, interpretasi skor UN didasarkan pada konsep *criterion-referenced measurement*. Keputusan kelulusan itu didasar-

kan pada acuan kriteria dan/atau domain skills yang diamanatkan kurikulum. Skor perolehan siswa pada UN dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga kemungkinan sebagian besar siswa akan lulus atau gagal secara teoritis dapat dijelaskan. Keganjilan terjadi jika hasil UN (yang sama) juga digunakan untuk kepentingan pemetaan, yang interpretasi skornya berbasiskan pada *norm-referenced measurement*, namun terus dipaksakan untuk menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya UN.

Dari sudut kepentingan pemetaan (*students profiling*) sebenarnya, ujian yang siswanya (hampir) lulus semua atau (hampir) tidak lulus semua hasilnya sama jeleknya. Sebab, pengguna (*users of assessment results*) tidak akan memperoleh banyak informasi berharga dari hasil tes semacam itu.

### **On-target**

Soal-soal tes untuk UN jika akan difungsikan sebagai pemetaan, semestinya berbeda dengan yang akan digunakan untuk kepentingan kelulusan meskipun duplikasi penggunaan soal-soal tes itu tetap masih dimungkinkan untuk dilakukan (Nitko, 1994). Namun untuk menyusun soal-soal tes yang berfungsi ganda, sebagai penentu kelulusan dan pemetaan bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun juga bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat dikerjakan.

Setiap soal-soal tes yang digunakan seharusnya *on-target*, artinya desain soal-soalnya harus dapat dengan tepat mengukur kemampuan setiap kandidat sehingga hasilnya akan dapat memberikan informasi dengan tepat individu siswa yang memiliki kemampuan terhadap mata pelajaran yang ditempuh dan siswa yang masih kurang menguasai mata pelajaran yang diuji. Sebagai fungsi pemetaan, instrumen tes yang digunakan harus mampu membedakan siswa dengan kualitas belajar baik dan siswa yang kurang dalam belajar. Setiap individu siswa akan dihargai sesuai dengan kualitas usahanya.

Kutipan ayat 286, surat Al-Baqarah di awal tulisan ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan desain pengujian pendidikan. Allah SWT sangat adil (*fair*) dalam memberikan ujian karena Allah Yang Maha Kuasa sangat mengetahui dan memahami keterbatasan dan perbedaan kemampuan masing-masing hamba-Nya. Allah SWT tidak memberikan ujian (*spiritual*) yang bebannya melebihi kapasitas seorang hamba untuk memikulnya, yang dalam jargon pengujian disebut "*on target.*" Siswa yang beruntung dapat memperoleh pengalaman pembelajaran dengan guru-guru, kepustakaan, dan dukungan fasilitas belajar yang baik seharusnya diuji dengan alat tes yang berbeda dengan siswa-siswa yang memperoleh pengalaman pembelajaran seadanya atau buruk meskipun kurikulum, standar, dan target

pencapaian ditetapkan sama secara nasional. Itulah yang disebut asas keadilan (*fairness*) dalam penilaian pendidikan, dan itu sejalan/konsisten dengan pesan surat Al Baqarah 286 di muka.

Jika setiap anak diharuskan menempuh instrumen tes yang sama, yang bersangkutan seharusnya juga diekspose dengan kualitas pembelajaran yang relatif sama. Yang terjadi pada ujian nasional (UN) tidak demikian. Sejumlah siswa yang beruntung dapat menikmati pengalaman pembelajaran sangat baik, yang diprediksi sudah mampu melompati mistar gawang yang tingginya antara 120-150 cm malah hanya diwajibkan melompat pada mistar yang tingginya hanya sekitar 100-130 cm; sebaliknya sangat banyak siswa sebenarnya hanya mampu melompati mistar setinggi antara 60-90 cm, malah dipaksa harus berhasil pada mister dengan ketinggian antara 100-130cm (lihat: hasil analisis UN 2012). Kondisi ujian semacam ini menjadi sangat paradoks dengan harapan pemerintah, yang menginginkan UN dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.

Jika kita simak dengan teliti hasil (data) ujian nasional, kita akan segera dapat menyimpulkan ternyata bagi anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah yang disiplin dan iklim belajarnya sangat baik, hampir 90 persen soal-soal ujian itu dapat dikerjakan dengan benar, artinya tantangan terhadap ujian hampir tidak ada (*not challenging*). Bagi anak-anak kelompok ini, soal-soal ujian akan dinilai sangat mudah.

Akibatnya, ujian bukannya menumbuhkan motivasi belajar; sebaliknya malah akan *discourage* mereka dalam belajar, sebab soal-soal ujian yang ada bagi mereka sudah terlalu mudah. Di lain pihak, kita menyaksikan begitu banyak siswa yang karena kondisi ekonomi keluarga sehingga hanya mampu 'membeli' pengalaman pembelajaran di sekolah-sekolah yang serba terbatas dipaksa harus mengikuti ujian yang kualitas soal-soal tesnya berada diluar jangkauan mereka untuk mencernanya. Akibatnya, siswa-siswa kelompok ini mengalami proses *demotivasi* dalam belajar. Mereka akan merasa sebagai *under-achievers*. Padahal ketidaksanggupan anak-anak ini belum tentu karena mereka memang tidak sanggup atau kurang pandai; tapi ketidakmampuan itu lebih banyak disebabkan oleh faktor buruknya kualitas pembelajaran yang diterima/diekspos kepada mereka selama proses pembelajaran di sekolah.

Keadilan Illahi menyebabkan ada sebagian di antara hamba-hambaNya diberikan penghargaan yang sepadan dengan amal usahanya; dan sebaliknya di antara hambaNya itu ada juga harus menanggung konsekuensi tertentu akibat kelalaiannya. Jadi pencapaian (*attainment*) setiap hambaNya terefleksi dengan sangat jelas dari tingkat kesungguhan usahanya. Ayat 286 Al-Baqarah ini hendaknya dijadikan pedoman bagaimana praktik penilaian yang memenuhi unsur keadilan dirancang dan dilaksanakan. Instrumen ujian harus dapat



mengukur kemampuan siswa secara tepat (on target) sesuai dengan kualitas pengalaman pembelajaran yang mereka tempuh. Untuk poin terakhir ini, dengan berhasil dikembangkannya *computer adaptive testing* (CAT), secara teknis masalahnya ke depan sudah akan dapat dipecahkan.

Selain itu, Allah swt dalam menetapkan keberhasilan (kelulusan) hamba-Nya dalam ujian menggunakan suatu *trait* atau *attribute* yang sangat netral dan adil bagi seluruh hamba-Nya, yaitu taqwa. Allah SWT tidak mengangkat derajat (meluluskan) seseorang karena hambaNya itu memiliki IQ tinggi, atau mempunyai kekayaan dalam jumlah sangat besar, atau berasal dari keturunan bangsawan, tapi berdasarkan kualitas *ketaatan* seseorang pada Allah wa jalla. *Ketaatan* itu merupakan *trait* netral (absolutely unbiased), artinya setiap individu manusia apakah ia memiliki IQ tinggi atau sebaliknya, kaya atau miskin, keluarga petani, keluarga buruh, atau pedagang akan mampu meraihnya asalkan yang bersangkutan berusaha keras untuk tujuan itu.

Ujian Nasional atau sekolah seharusnya dapat mengambil pelajaran dari AlQur-an. Setiap instrumen ujian yang digunakan semestinya hanya mengukur kemampuan yang merupakan hasil pengalaman belajar siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan daya dukung sekolah, bukan mengukur SES siswa (kedudukan ekonomi keluarga siswa), yang indikasinya keberhasilan siswa dalam

menjawab soal-soal tes karena dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi keluarga. Siswa yang berasal dari keluarga kaya kecenderungannya selalu akan memperoleh nilai baik (tinggi); sebaliknya yang berasal dari keluarga miskin akan selalu mendapatkan nilai rendah (jelek). Alat tes semacam itu disebut bias terhadap siswa yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi lebih beruntung, namun kurang bersahabat dengan siswa yang berasal dari keluarga miskin (Widiatmo, 2009).

Selain itu, instrumen ujian (tes) hendaknya hanya mengukur kemampuan hasil belajar siswa yang sesuai dengan kurikulum, dan bukan mengukur kemampuan yang dibawa siswa dari luar bangku sekolah, seperti kemampuan/bakat tertentu yang diperoleh bukan dari hasil proses pembelajaran di sekolah. Kemampuan/bakat khusus (spesifik) itu biasanya diukur dengan alat tes lain, bukan tes prestasi belajar (*achievement test*) yang basisnya adalah kurikulum.

Al-Quran (2:288) mengajarkan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang sudah diusahakannya dengan sungguh-sungguh. Dalam ujian nasional atau sekolah, semestinya, hanya siswa yang menunjukkan usaha belajar maksimal dan baik yang diberikan penghargaan (*certified*); sebaliknya yang suka melalaikan tanggung jawab belajarnya akan mendapatkan risiko dari kelalaiannya itu. Sekolah hendaknya hanya mempromosikan atau meluluskan anak-anak yang kualitas

belajarnya baik. Karena jika kita ingin menilai kinerja siswa dalam belajar dan kualitas guru dalam mengajar maka alat tes yang digunakan seyogyanya dapat membedakan kualitas dan kinerja belajar siswa dan guru itu.

### **NS sebagai Penentu Kelulusan**

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyempurnakan kualitas UN, di antaranya ditetapkannya nilai sekolah (NS) sebagai bagian informasi akademik tambahan dalam menentukan kelulusan siswa meskipun bobotnya hanya sebesar 40 persen. Kebijakan itu menurut penulis adalah tepat dan ilmiah, sebab NS dapat digunakan untuk melengkapi bukti validitas (*validity evidences*) yang dibutuhkan penyelenggara dalam menafsirkan dan menggunakan skor tes sesuai dengan tujuan tes (*test use and interpretation*). Namun, kewenangan yang diberikan pada sekolah itu sayangnya belum diikuti dengan pelatihan dan advokasi tentang bagaimana seharusnya merancang model penilaian pada tingkat sekolah yang selaras dengan konsep *balanced assessment systems* yang disainnya, selain dapat menunjukkan keterkaitan antara kurikulum, pembelajaran (*instruction*), dan penilaian, juga secara jelas akan dapat memetakan keseimbangan penerapan *large scale assessment* (UN) dan penilaian kelas (*formatif dan sumatif*). Selain itu, desain penilaian kelas/sekolah seharusnya juga lebih diarahkan untuk mengukur kemampuan

kurikulum yang lebih kompleks dan membutuhkan penalaran tinggi *high-order thinking skills (HOTS)* dan pembentukan karakter.

Karena minimnya advokasi dan pelatihan, duplikasi penggunaan konsep materi dan *thinking skills* yang digunakan pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional sulit untukantisipasi dan dihindarkan. Karenanya, upaya memperluas lingkup kurikulum (*curriculum coverage*), yang dapat diukur melalui sistem ujian sekolah dan nasional belum sepenuhnya memenuhi harapan; akibatnya, sumbangan NS dalam memperkuat dan memperkaya bukti validitas (*validity evidences*) masih dipertanyakan. Padahal kelemahan ujian nasional sebagai penentu kelulusan, utamanya karena kontraksi atau penyempitan pada kurikulum pembelajaran.

Untuk menjawab berbagai permasalahan di muka dibutuhkan sebuah sistem penilaian yang lebih komprehensif dan berimbang, *Balanced Assessment System (BAS)*, sehingga ujian nasional (UN) dan ujian sekolah (US) dapat bersinergi dan menjelma (*transform*) menjadi sebuah sistem penilaian pendidikan nasional. Dengan BAS, UN sejak awal hanya dirancang untuk mengukur kemampuan pada kurikulum yang penting tapi relatif sederhana, sehingga memungkinkan banyak konsep materi dan kompetensi dasar (KD) yang dapat diujikan (*wider-range of curriculum coverage*). Sedangkan ujian sekolah (US) diberi mandat

untuk mengukur kemampuan kurikulum yang lebih kompleks dan membutuhkan penalaran tingkat tinggi (*high-order thinking skills*) dan memperkuat karakter. Dengan BAS sangat dimungkinkan konsep materi dan KD pada kurikulum didistribusikan secara tepat pada ke dua ujian, US (meliputi penilaian formatif dan sumatif) dan UN. Kompetensi kompleks yang menuntut kemampuan *high-order thinking skills* diujikan melalui *project works*, portofolios, dan penilaian alternatif lainnya, sedangkan konsep penting, namun menuntut kemampuan penalaran yang lebih sederhana diujikan pada UN dengan menggunakan format tes Pilihan Ganda (PG), Benar/Salah (B/S), atau tes bentuk objektif lainnya, sehingga konsep materi dan *thinking skills* yang tersebar pada kurikulum dapat direkam secara lebih proporsional. Selanjutnya, *psychometricians* ditugaskan untuk mengkaji prosedur penyatuan seluruh skor (NS/UN) itu.

### **BAS melayani berbagai kepentingan**

Menurut Stiggins (2007), kita melakukan kegiatan penilaian adalah untuk mengumpulkan bukti berupa data/informasi yang dapat membantu kita dalam membuat keputusan pembelajaran siswa. Selain itu, kegiatan penilaian dapat juga digunakan untuk mendorong siswa belajar dengan baik. Kedua tujuan di muka hendaknya dapat terlayani secara baik dan terukur sehingga sekolah dapat dikatakan bermanfaat (*effective schools*).

Penilaian yang berkualitas sebagaimana dikemukakan Stiggins, harus dapat “secara akurat merekam informasi tentang hasil pembelajaran siswa sehingga informasi itu dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan atau membuat keputusan pada berbagai tingkatan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, penilaian harus memenuhi tiga standar kualitas, antara lain: 1) penilaian harus dirancang untuk memenuhi tujuan khusus yang dirumuskan dengan jelas dan harus dapat dirukur; 2) penilaian harus dapat menjelaskan keberhasilan belajar siswa sesuai dengan batasan khusus yang dirumuskan sebelumnya; 3) penilaian juga dirancang untuk secara khusus memenuhi tujuan tertentu sesuai dengan target dan konteks masing-masing sekolah.”

BAS memetakan dengan sangat jelas tugas dan tanggung jawab siswa, guru, orang tua (*guardians*), kepala sekolah, pemerintah, dan pengguna hasil pendidikan (*users*) sehingga kemajuan belajar siswa dapat diikuti/direkam dengan jelas. Keberhasilan dan kemajuan pembelajaran dibebankan pada beberapa aktor yang substansi tugasnya kelihatannya bisa sama atau berbeda, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini (Stiggins (2007)).

## Tingkat 1: Pemakai Hasil Penilaian Kelas

Pengambil Keputusan	Pertanyaan Penting Yang Harus Di Jawab	Informasi Yang Dibutuhkan	Implikasi dari Sistem Penilaian
SISWA	Apa seyogyanya yang saya (siswa) pelajari?	Target pembelajaran yang dirumuskan dgn bahasa yang mudah dipahami siswa.	Penilaian yang akurat yg harus merefleksikan target pembelajaran yang harus dicapai siswa.
	Apa saja konsep/materi yang saya sangat yakin sudah paham, dan apa yang saya masih harus dalam lagi agar lebih mengerti?	Bukti yang menunjukkan siswa sudah paham dan bagian dari konsep/materi yang belum dikuasainya dengan baik dan siswa dapat menelusurikembali untuk evaluasi/koreksi diri.	Penilaian kelas yang akurat, berkelanjutan serta diikuti dengan umpan balik yang bersifat deskriptif dg menggunakan bahasa yang akrab dan mudah dipahami siswa.
	Apa yang selanjutnya mesti saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman?	Informasi yang diperoleh melalui <i>self-assessment</i> harus jelas dan dikenali sehingga dapat membantumerumuskangoalyang harus dicapai dlm pembelajaran siswa.	Praktek penilaian kelas yang akurat dan berkelanjutan hasilnya harus dapat menunjukkan pada siswa apa selanjutnya yang ia akan (dapat) kerjakan.
	Apakah saya sudah mencapai atau dalam proses untuk mencapai standar yang penting (important standards)	Status penguasaan (mastery) untuk setiap standar penting itu dirumuskan dlm bahasa yang di-pahami siswa (student-friendly language).	Penilaian hrs dpt menyajikan data dan informasi (evidence) terhadap standar-standar yg sudah berhasil dikuasai (standards mastered) secara periodik dalam thn ajaran itu.
	Apakah saya sudah berhasil mencapai standar yang diharapkan pada tingkat nasional?	Pjelaskan ttg status, apakah siswa sudah mencapai standar nasional harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan dimengerti siswa.	Penilaian nasional yang dilakukan setiap tahun harus melaporkan standar-standar yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai siswa.
GURU	Apa yang semestinya dipelajari oleh siswa saya?	Standar direkonstruksi/diurai lagi menjadi target-target pencapaian pada tingkat kelas dan kemudian disusun peta kemajuan kurikulum mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, propinsi, dan nasional.	Semua penilaian harus mencerminkan target-target ini, dalam arti setiap penilaian harus secara jelas merefleksikan setiap target yang ada.
	Apa saja yg sudah dipelajari siswa dan apa yang mereka masih butuhkan untuk pelajari lagi ke depan?	Bukti (data/informasi) terus menerus yang mengungkapkan kedudukan masing-masing siswa pada setiap saat dalam kemajuan pembelajaranyang mengarah kesetiap standar	Penilaian kelas yang akurat dan dilakukan secara teratur selama pembelajaran untuk memberikangambaran kemajuan dalam penguasaan standar-standar.
	Siswa yg membutuhkan pelayanan/perhatian khusus?	Bukti (data/informasi) tentang kinerja pembelajaran siswa dalam kaitannya dengan ekspektasi tingkatan kelas, atau usia (grade and age-level expectations)	Penilaian harus memberikan bukti (data/informasi) tentang status atau kemajuan siswa secara relatif untuk menentukan kelayakan (apakah status atau kemajuan siswa secara relatif itu sudah memadai).
	Apakah siswa saya sdh memenuhi atau dalam proses menuju pemenuhan standar penting yg diharapkan?	Status penguasaan setip siswa atas setiap standar yang sudah ditetapkan.	Penilaian harus menunjukkan bukti (data/informasi) tentang penguasaan terhadap setiap standar secara berkala di sepanjang tahun ajaran.
	Apakah saya sudah memenuhi ekspektasi standar nasional?	Status yg berkaitan dengan pemenuhan standar nasional itu dirumuskan dg bahasa yang dipahami siswa.	Penilaian nasional membuat laporan tentang standar yang sudah dapat dikuasai (master) dan yang belum berhasil dikuasai.
ORANG TUA	Apakah yang semestinya dipelajari anak saya?	Target pembelajaran dari awal pembelajaran dirumuskan dgn bahasa yang dipahami keluarga.	Penilaian yang dilakukan harus secara akurat merefleksikan target 2 itu.
	Apa yang sudah dapat dipelajari anak saya dan apa yang belum?	Hasil penilaian dpt menyajikan informasi tentang kedudukan anak di setiap tahapan dalam proses menuju penguasaan setiap target pembelajaran.	Penilaian kelas yang akurat dan dilakukan secara berkelanjutan (continuous assessment) harus mampu memberikan gambaran tentang kemajuan pembelajaran.

*Pengujian Berimbang : Refleksi dan Tinjauan Kritis dari Perspektif Alqur'an*

Pengambil Keputusan	Pertanyaan Penting Yang Harus Di Jawab	Informasi Yang Dibutuhkan	Implikasi dari Sistem Penilaian
	Apakah perkembangan belajar anak saya sudah memuaskan sesuai dengan ekspektasi kelas	Informasi yang diperoleh dari self-assessment anak, indikator keberhasilan yang disediakan guru dan anak itu sendiri	Penilaian sumatif yang diselenggarakan secara periodik harus menjadi masukan nilai rapor dan sekaligus merupakan ringkasan informasi dari terpenuhinya standar
	Apakah anak saya memerlukan pelayanan pendidikan khusus?	Kualitas pembelajaran siswa dikaitkan dengan tingginya kelas dan usianya	Bukti (data/informasi) hasil penilaian memerlukan penafsiran/ interpretasi yang disesuaikan dengan ekspektasi tingkat pencapaian (usia dan jenjang kelas).
	Bagaimana kemajuan pencapaian belajar anak saya jika dibandingkan dengan ekspektasi pencapaian nasional	Standar yang digunakan harus dapat menjelaskan kesesuaiannya dengan standar nasional.	Bukti (data/informasi) pembelajaran yang diperoleh/dikumpulkan selama tahun ajaran.
	Apakah anak saya sudah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional?	Status- keterangan yang menjelaskan standar nasional itu sudah dipenuhi.	Bukti (data/informasi) hasil dari penilaian akurat yg menyatakan tingkat penguasaan masing2 standar yang dikumpulkan setiap tahun.

**Tingkat 2 : Pengguna Hasil Dukungan Pengajaran**

Para Pembuat/ Pengambil Keputusan	Keputusan Yang Akan Diambil	Informasi Yang Dibutuhkan	Berbagai Implikasi dari Penilaian
<b>Kepala Sekolah, Penanggung jawab Kurikulum, dan Kelompok Guru Mata Pelajaran</b>	Apa saja standar yang diharapkan dapat dikuasai siswa untuk setiap mata pelajaran pada suatu jenjang pendidikan?	Target pembelajaran dirumuskan dalam bentuk standar sesuai dengan jenis mata pelajaran dan tingkat kelas.	Penilaian harus merefleksikan standar dan kaitannya dengan pembelajaran tingkat kelas.
	Yang mana di antara standar itu yang sudah dikuasai dan bagian mana yang segera akan dikuasai dgn cukup? Adakah permasalahan di sana?	Informasi yang mengungkapkan pola pencapaian dalam sebuah sekolah, dikalangan guru2, rentang tingkat kelas, dan mata pelajaran.	Bukti (data/informasi) yang bisa dibandingkan tentang status/ kedudukan siswa dalam pembelajaran.
	Apakah jumlah siswa yang dapat mencapai standar tahun ini cukup memadai jumlahnya?	Proporsi siswa yang berhasil memenuhi standar dan yang belum memenuhi standar untuk masing2 mata pelajaran/ standar	Penilaian tahunan mengungkap bagaimana siswa dapat berhasil mencapai/ menguasai masing standar
	Apa saja standar yang harus dikuasai siswa di ruang kelas, jenjang kelas, dan sekolah?	Standar yang dikuasai pada tingkat kelas, mata pelajaran dipetakan berdasarkan jenjang kelas diseluruh sekolah.	Penilaian yang digunakan harus merefleksikan seluruh standar yang ada.
	Apakah jumlah siswa yg berhasil menguasai/ memenuhi standar tahun ini cukup memadai?	Proporsi siswa yang sudah memenuhi standar.	Penilaian tahunan mengungkap bagaimana siswa bisa berhasil menguasai masing2 standar.

Tingkat 3: Pengguna pada Tingkat Pengambil Kebijakan

Para Pengambil Keputusan	Keputusan Yang Akan Diambil	Informasi Yang Dibutuhkan	Berbagai Implikasi dari Penilaian
<b>Kepala Dinas Pendidikan</b> Berbagai Pengambil Kebijakan: >Dewan Pendidikan, >Badan Legislatif, >Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan > Usahawan dan Pimpinan Masyarakat.	Apa saja standar yang harus dikuasai?	Target pembelajaran dirumuskan dalam bentuk standar sesuai dengan jenis mata pelajaran dan tingkat kelas.	Penilaian harus merefleksi standar –standar itu.
	Yang mana di antara standar itu yg sdh dpt dikuasai dan standar yang mana segera akan dikuasai dgn cukup baik, dan di sekolah apa?	Informasi yang mengungkapkan pola keberhasilan dalam pencapaian pada sebuah sekolah, dan antar sekolah.	Bukti (data/informasi) yang bisa dibandingkan tentang kedudukan siswa dalam kegiatan pembelajaran dikumpulkan secara periodik dalam suatu tahun ajaran.
	Apakah jumlah siswa yang dapat mencapai standar tahun ini cukup memadai jemlahnya?	Proporis siswa yang sudah berhasil memenuhi masing-masing standar.	Penilaian tahunan mengungkan bagaimana siswa dapat berhasil mencapai/ menguasai masing standar
	Standar yang mana saja yang harus dikuasai siswa di sekolah2 kita?	Target pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk standar.	Penilaian harus merefleksikan standar-standar itu.

*Adapted from Rick Stiggins (2007)*

## **SIMPULAN**

Pembangunan sistem penilaian nasional hendaknya memperhatikan keseimbangan antara penilaian yang berorientasi pada kebutuhan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pembelajaran siswa secara individual (assessment for learning), dan penilaian eksternal (large-scale examinations) dan penilaian sekolah (formatif dan sumatif ) di samping pemenuhan prinsip-prinsip psikometri, seperti kesahihan/validitas, reliabilitas, dan keadilan (fairness). Pembangunan sistem penilaian semacam ini sangat konsisten dengan pesan Al Qur'an yang didiskusikan sebelumnya.

BAS akan dapat menciptakan pendidikan berkualitas sesungguhnya (genuine) karena praktik penilaian ini sangat memperhatikan (sensitive) terhadap proses pembelajaran di kelas. Studi yang dilakukan Black dan William (1998), dan John Heity (2007) menguatkan kesimpulan ini. Popham menyimpulkan adalah sangat keliru apabila pengambil keputusan mengabaikan kehandalan dan keunggulan penilaian sekolah (formative and summative assessments) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Sebagaimana dikemukakan ujian eksternal tidak akan pernah efektif untuk mendorong perubahan dan peningkatan mutu pendidikan apabila penilaian pada tingkat sekolah terus dibiarkan luput dari perhatian. Padahal hanya dengan kombinasi *rigorous* ujian

eksternal dan ujian sekolah kualitas pendidikan dan pembelajaran siswa (student learning) dapat diwujudkan. *Wallahu'alam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Black, P. and Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Educational Assessment: Principles, Policy and Practice*, 5(1), 7-74. Also summarized in an article entitled, Inside the black box:
- Raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan*, 80(2), 139-148.
- Hattie, J. and Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Nitko, A. J. (1994). *A Model for Curriculum-Driven Criterion-Referenced and Norm-Referenced National Examinations for Certificaton and Selection of Students*. A paper presented at the Association for the Study of Educational Evaluation in Southern Africa's (ASEESA) Second International Conference on Educational Evaluation and Assessment, Pretoria, South Africa, July 1994.
- Popham, W.J. (2008). *Transformative Assessment*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Stiggins, R.J. (2006). *Balanced Assessment Systems: Redefining Excellence in Assessment*. Educational Testing Service.
- Stiggins, R.J. (2007). *Assessment for learning: A key to student motivation and learning*. *Phi Delta Kappa EDGE*, 2(2), 19 pp.
- The Presidency of Islamic Researchs, IFTA, CALL, and GUIDANCE. *The Holy Qur-an* (English Translation of the meanings and Commentary). The Custodian Of The Two Holy Mosques Kind Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur-an, Al Madinah Al-Munawarah.
- Widiatmo, H. (2009). *Sistim Ujian di Indonesia: Termometer Rusak*. Paper disajikan pada diskusi terbatas Ikatan Guru Idonesia (IGI).



# UJIAN NASIONAL SEBAGAI ALAT INTERVENSI PEMBUDAYAAN KARAKTER BANGSA

Deni Hadiana

Peneliti Muda di Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud

E-mail: deni\_hadiana@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*The National Final Assessment (UN) as an external assessment is considered, by some people, irrelevant with the character education. The UN actually has great contribution toward students' cognitive, affective, psychomotor development and character building. The character education' values that are relevant to UN are religious, honest, disciplinary, hard-working, creative, independent, curious, nationalistic, achievement appreciatory, reading delighted, and responsible. A good UN management and preparation will be a character building agent and an instrument showing the success in the character education implementation. There isn't any contradiction between the UN and the national character education. This article explains clear, accurate, and deep analysis towards the UN's role in the national character education implementation.*

**Keywords:** national final examination, national character.

## **ABSTRAK**

*Ujian Nasional sebagai bentuk penilaian eksternal masih dianggap oleh sebagian orang tidak relevan dengan pendidikan karakter. Ujian Nasional sesungguhnya sangat berkontribusi terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik serta pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang relevan dengan Ujian Nasional yaitu religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, gemar membaca, dan tanggung jawab. Pengelolaan, persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional yang baik akan menjadi alat intervensi pembudayaan karakter bangsa sekaligus menjadi instrumen keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Ujian Nasional dan pendidikan karakter bangsa. Tulisan ini memaparkan kajian yang jernih, cermat, dan mendalam berkaitan dengan peran dan kedudukan Ujian Nasional dalam implemmentasi pendidikan karakter bangsa.*

**Kata kunci:** Ujian Nasional, karakter bangsa

## PENDAHULUAN

Nelson Mandela, Presiden pertama Afrika Selatan pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. “Kalimat sakti” ini tentu tidak terungkap secara spontan, asal bunyi, melainkan lahir dari sebuah pemikiran mendalam dan pengalaman pahit getirnya kehidupan salah satu tokoh anti politik apartheid. Nelson Mandela meyakini dan sekarang terbukti bahwa hanya pendidikanlah yang dapat mengubah bangsa-bangsa di dunia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak biasa menjadi biasa, dan dari apartheid menjadi anti apartheid. Selain Afrika Selatan, Jepang menjadi negara yang telah membuktikan bahwa komitmen maksimal terhadap pendidikan adalah investasi dan solusi cerdas untuk “menguasai dunia”. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Seolah tidak mau kalah dari Jepang dan Afrika Selatan, para Pendiri negeri ini telah menjadikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan dan komitmen Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Fungsi pendidikan nasional di Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Sisdiknas tersebut mengamanahkan kepada pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (*quality assurance*) bagi setiap warga negara. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan saat ini adalah pelaksanaan ujian nasional (UN) dan implemementasi pendidikan karakter.

Sebagian pihak sering menganggap UN tidak relevan dengan pendidikan karakter, bahkan cenderung menghambat implementasi pendidikan karakter. Mereka menganggap UN telah mendorong siswa, guru, dan pihak yang berkepentingan berbuat curang dan tidak jujur. Pendapat yang menjadikan UN sebagai kambing hitam menarik untuk dikaji dan dijadikan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dengan demikian tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan kajian yang jernih, cermat,

dan mendalam berkaitan dengan peran dan kedudukan UN dalam implementasi pendidikan karakter bangsa.

## KAJIAN LITERATUR

Keberhasilan suatu sistem pendidikan ditentukan oleh suatu sistem penilaian yang tepat, termasuk sistem ujian. Menurut pengalaman sejarah, hasil penelitian yang ada tentang pelaksanaan UN, dan hasil studi banding terhadap sistem ujian akhir di beberapa negara, UN dapat dikembangkan menjadi sistem dan alat yang tepat dalam rangka pengendalian mutu pendidikan (*quality control*) dan perbaikan mutu pendidikan (*quality improvement*) pada setiap satuan pendidikan. UN dapat memacu sekolah untuk menghasilkan lulusan yang lebih bermutu.

UN juga memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk menumbuhkan daya kompetitif sekolah demi terwujudnya sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005. Selain itu, UN bisa menjadi daya perekat antardaerah di era otonomi ini, karena semua sekolah dan daerah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan kriteria yang sama dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan.

Untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik perlu diselenggarakan evaluasi

formatif (*formatif evaluation*) dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) pada setiap satuan pendidikan. Evaluasi formatif dapat berbentuk evaluasi hasil belajar di tingkat kelas yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran. Evaluasi sumatif dapat berbentuk evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk ujian (*examination*) untuk pemberian sertifikasi dan pemetaan mutu lulusan satuan pendidikan.

Menurut Furqon dkk., suatu kegiatan ujian biasanya ditujukan untuk memenuhi fungsi dan mencapai tujuan tertentu. Fungsi utama yang diemban dapat berbeda antara kegiatan ujian yang satu dari kegiatan ujian lainnya bergantung kepada tujuan khusus penyelenggaraan ujian itu. Secara umum, fungsi-fungsi yang diharapkan dari kegiatan ujian pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas publik (*public accountability*), yaitu bahwa ujian dalam pendidikan diharapkan mampu menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kemajuan dan prestasi yang dicapai sehubungan dengan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan dalam kegiatan pendidikan.
- b. Pengendalian mutu (*quality control*) pendidikan. Sebagai pengendali mutu pendidikan, ujian diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan dan menjamin bahwa setiap keluaran

(lulusan) pendidikan telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, atau standar tertentu yang ditetapkan.

- c. Motivator (*pressure to achieve*), yaitu bahwa evaluasi diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong dan “memaksa” pengelola dan penyelenggara serta pelaksana (guru dan peserta didik) pendidikan untuk berusaha lebih keras dan sungguh-sungguh dalam mencapai hasil yang diharapkan.
- d. Seleksi dan penempatan, yaitu bahwa hasil evaluasi pendidikan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak seorang pelamar, khususnya jika tempat yang tersedia lebih sedikit dari jumlah yang melamar. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ke mana seorang dianjurkan untuk melanjutkan pendidikannya atau terjun ke dunia kerja.
- e. Diagnostik, yaitu bahwa evaluasi dapat memberikan umpan balik (*feedback*) kepada sistem tentang kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat ditentukan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan. Fungsi ini sering juga dikaitkan dengan fungsi peningkatan mutu (*quality improvement*) karena balikan yang tepat dapat mendorong kegiatan dan program pendidikan untuk senantiasa melakukan peningkatan mutu

layanan pendidikan dan keluaran yang dihasilkannya. Kegiatan evaluasi seperti ini dapat diselenggarakan dalam satuan kelas, satuan sekolah, satuan daerah, sampai satuan nasional.

UN sebagai salah satu bentuk dari evaluasi sumatif. Perlu memerhatikan beberapa prinsip yakni, UN harus benar-benar mampu mengukur prestasi belajar peserta didik (*student achievement effectiveness*), artinya peserta didik yang prestasi belajarnya baik mendapat nilai yang baik dan peserta didik yang prestasi belajarnya buruk mendapat nilai yang buruk. Di samping itu, UN harus dilaksanakan secara adil dan berlaku sama bagi semua peserta (*equity*), serta memberikan insentif belajar bagi peserta didik yang dikenai ujian (*teaching-learning incentive*). UN yang diselenggarakan secara benar akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik (*motivation*) karena setiap peserta didik akan berusaha keras untuk mencapai prestasi belajar yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, UN bisa menjadi sarana pembiasaan karakter bangsa yakni kerja keras.

**Karakter bangsa** dalam antropologi (khususnya masa lampau) dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut. (Armando dkk, 2008). Soekarno, sekitar 52

tahun lalu pernah mengumandangkan konsep kemandirian suatu bangsa melalui jargon “berdikari”, menurutnya kemandirian suatu bangsa hanya bisa dibangun melalui kerja keras, seperti kerja kerasnya bangsa Jepang yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat perang dunia kedua. Soekarno juga mengharapkan bahwa karakter bangsa yang suatu saat terbentuk adalah bangsa yang memiliki jati diri, tidak *ngak ngik ngok*, dan tidak menjadi bangsa tempa yang lemah tak berdaya seperti dikutip [www.fpk.or.id](http://www.fpk.or.id). Secara yuridis, pendidikan karakter bangsa dapat dicermati pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sisdiknas merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam menuju cita-cita pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu menjadi dasar dalam perumusan, pengembangan dan implementasi pendidikan karakter bangsa. Secara teknis, pengertian pendidikan karakter

bangsa diuraikan dalam buku pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa (Kemdiknas 2010). Dalam buku tersebut, pendidikan diartikan sebagai upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Lebih lanjut, buku tersebut menguraikan tentang kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,

budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Nilai pendidikan karakter bangsa dapat dilihat pada tabel berikut. (Kemdiknas, 2010).

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai	Deskripsi
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan

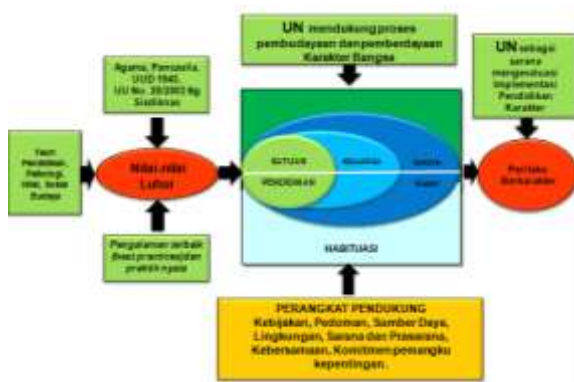
Nilai	Deskripsi
	penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai tersebut dibutuhkan oleh siswa, sekolah, guru, dan orang tua dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyikapi UN. Dengan demikian UN bisa menjadi sarana pendukung dalam implementasi pendidikan karakter.

### Ujian Nasional dan Pendidikan Karakter Bangsa

UN sebagai tes baku berskala besar yang mulai diterapkan tahun 2004 memiliki potensi

yang sangat besar dalam mengembangkan potensi guru, sekolah, dan peserta didik pada aspek kognitif dan karakter. Hubungan antara UN dan pendidikan karakter dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan UN dan Pendidikan Karakter (diolah dari berbagai sumber)

Peserta didik, guru, dan sekolah selalu harap-harap cemas pada sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan UN. Kecemasan itu sering menimbulkan protes yang berujung pada penolakan terhadap UN. Protes menurut Zainul (2007) pada dasarnya merupakan kesadaran akan ketidakpuasan dan ketidakberdayaan terhadap sesuatu yang berada di luar diri si pemrotes. Lebih lanjut, Zainul mengatakan, nilai, akal, dan hati nurani individu yang diperoleh melalui proses pendidikan menjadi tolak ukur yang digunakan dalam protes tersebut, baik dalam keluarga, individu, maupun dalam masyarakat. Pendidikan kita cenderung

menghasilkan individu yang memiliki *external locus of control* ketimbang individu mandiri yang memiliki *internal locus of control*. Kecemasan-kecemasan yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan opini negatif terhadap UN. Mereka menganggap UN menjadikan siswa, orang tua, guru, dan pengelola pendidikan untuk berbuat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab sehingga UN tidak relevan dengan pendidikan karakter, misalnya siswa menyontek saat UN, guru menyebarkan kunci jawaban, orang tua membeli soal dan kunci jawaban, pengelola pendidikan menghalalkan segala cara agar hasil UN baik. Menurut Zainul (2011), UN sering dipersalahkan sebagian pihak oleh karena kurangnya informasi tentang kebaikan tes baku. Padahal bukan UNnya yang salah, tetapi bagaimana cara orang memandang dan menghadapi UN. Dengan demikian UN harus dipandang sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan penilaian pendidikan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan UN. Seluruh tahapan tersebut harus disikapi, dipersiapkan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik baik potensi pikir, potensi hati, potensi raga, maupun potensi rasa. Untuk berprestasi dalam UN, semua domain pendidikan karakter yakni olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasaharus diotimalkan dengan baik. Sebelum UN berlangsung, siswa harus cerdas dengan cara

giat belajar (olah pikir); siswa, guru, pengelola pendidikan, orang tua harus melaksanakan UN dengan jujur dan bertanggung jawab (olah hati); siswa harus selalu sehat dan fit agar konsentrasi saat UN (olah raga); siswa harus peduli terhadap siswa dalam dalam mempersiapkan UN (olah rasa dan karsa). Setelah siswa mempersiapkan dan melaksanakan UN dengan maksimal, siswa tersebut harus berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Bahkan untuk mendukung implementasi UN dan implementasi pendidikan karakter, Kemdikbud mewajibkan semua pihak yang terlibat UN menandatangani pakta integritas pelaksanaan UN jujur dan mengeluarkan moto UN: “ Prestasi Yes. Jujur Harus!” Dengan demikian UN dapat dijadikan sebagai sarana pendukung pembudayaan dan pemberdayaan perilaku berkarakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari 18 nilai pendidikan karakter, nilai-nilai yang relevan dengan UN antara lain: religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, gemar membaca, dan tanggung jawab. Selain itu, gambar 1 mengungkapkan bahwa UN dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi implementasi pendidikan karakter. Dengan demikian, benarkan UN membuat siswa, orang tua, guru, dan pengelola pendidikan menjadi manusia Indonesia yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab? “Ataukah “UN merupakan instrumen pengungkap ketidakjujuran dan ketidakbertanggungjawaban oknum siswa, guru,

orang tua, dan pengelola pendidikan dalam menghadapi UN?”

Tabel 2 memperlihatkan nilai dan perilaku berkarakter dalam UN.

Tabel 2. Nilai dan Perilaku Berkarakter dalam UN

Nilai yang Relevan dengan UN	Perilaku Berkarakter dalam UN
Religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdoa sebelum dan sesudah ujian</li> <li>▪ Melakukan ritual keagamaan dalam menghadapi UN</li> <li>▪ Tawakal terhadap hasil UN</li> </ul>
Jujur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaporkan setiap indikasi ketidakjujuran dalam UN</li> <li>▪ Tidak menyontek dan tidak berbuat curang dalam ujian</li> <li>▪ Tidak membawa fasilitas komunikasi pada saat ujian.</li> <li>▪ Menyalin tulisan mengerjakan soal UN dengan jujur</li> <li>▪ Memiliki motto “Prestasi yes. Jujur harus!</li> </ul>
Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hadir tepat waktu</li> <li>▪ Mematuhi seluruh POS UN</li> <li>▪ Mengikuti seluruh kegiatan dalam persiapan UN</li> </ul>
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyukai suasana kompetisi yang sehat.</li> <li>▪ Belajar dengan kerja keras, pantang menyerah, dan daya tahan belajar</li> </ul>
Kreatif	Mencari terobosan-terobosan belajar yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan
Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mempercayai kunci jawaban yang beredar</li> <li>▪ Tidak tergantung pada orang lain dalam mengerjakan soal UN</li> </ul>
Rasa Ingin Tahu	Gemar mencari informasi yang berkaitan dengan UN dari media cetak dan elektronik serta sumber lainnya
Semangat Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengikuti UN</li> <li>▪ Bangga karena semua siswa yang berbeda-beda suku, etnis, agama, satus sosial-ekonomi mengikuti UN</li> </ul>



Nilai yang Relevan dengan UN	Perilaku Berkarakter dalam UN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangga karena dalam izajah terdapat lambang burung Garuda sebagai simbol nasionalisme dan kebangsaan</li> </ul>
Menghargai Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKHUN dan izajah sebagai tanda menghargai prestasi peserta UN</li> <li>▪ Siswa yang berprestasi dalam UN bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjut yang bermutu</li> </ul>
Gemar Membaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sering kunjungan perpustakaan</li> <li>▪ Saling tukar bacaan.</li> </ul>
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bertanggung jawab terhadap hasil UN dan tidak menyalahkan orang lain</li> </ul>

Tabel tersebut memberikan informasi tersurat apabila masih ditemukan oknum siswa, guru, dan sekolah tidak jujur dan penuh kecurangan dalam UN berarti pendidikan karakter belum diimplementasikan dengan benar.

Berbagai upaya tidak wajar dalam mempersiapkan UN merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab peserta didik yang terlalu besar ke luar dari dirinya. Tanggung jawab dominan dalam mempersiapkan UN diambil alih oleh sekolah, guru, orang tua dan bahkan bimbingan belajar padahal seharusnya dipikul sendiri oleh peserta didik. Hal itu telah mengarahkan peserta didik untuk cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sulit mempercayai kemampuan dirinya sendiri. UN yang dipersiapkan, dikelola, dan dilaksanakan dengan baik dapat memberi tantangan yang terukur untuk dapat menciptakan kemandirian

peserta didik sekaligus memberikan pengalaman sukses dalam memecahkan masalah serta tantangan sehari-hari yang dihadapi. Setiap perasaan sukses yang dialami oleh peserta didik, akan menjadi investasi dalam membina *self-esteem* mereka (Zainul, 1997). Menurut Zainul (1997) konsep *self-esteem* berkaitan dengan beberapa konsep lain seperti *self-confidence*, *self-concept*, *self-talk*, serta *self-image*. Kelima konsep tersebut dinamakan sebagai *team of self*. *Team of self* adalah sisi kepribadian yang senantiasa harus menjadi perhatian setiap pendidik untuk dibina secara terencana dan berkesinambungan. Setiap tindakan mendidik yang dilakukan oleh guru perlu memiliki upaya peningkatan kelima unsur kepribadian (karakter) tersebut. Lebih lanjut Zainul (1997) mengungkapkan, pembinaan *self-esteem* merupakan bagian yang termudah dari dari kelima *team of self*s. Pembinaan *self-esteem* dapat dimulai dengan pembinaan *self-talk* yaitu menyatakan kepada diri sendiri tentang hal-hal yang kita sukai mengenai diri kita sendiri. Hal ini tampaknya sangat mudah, tetapi menjadi sangat sulit pada budaya masyarakat kita yang pantang melihat kelebihan diri sendiri. *Self-confidence* dapat dibina jika individu berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik (Zainul, 1997). *Self-confidence* dalam proses pendidikan dibina melalui langkah melihat diri sendiri dan mulai membuat pernyataan-pernyataan tentang diri sendiri. Pernyataan-pernyataan (*self-talk*) tersebut tidak

semuanya bersifat positif. Pembinaan dimulai dengan cara berusaha mengubah semua pernyataan negatif menjadi positif melalui upaya mengubah perilaku dan tindakan. Pembinaan *self-image* harus dimulai dengan mencari dan menemukan apa yang diharapkan oleh diri sendiri, apa kekuatan diri, apa yang membedakan diri kita dari orang lain dalam konteks yang positif. Proses pendidikan perlu diorientasikan bagi pencapaian potensi pribadi tersebut.

UN, selama ini dianggap oleh sebagian besar siswa dan guru sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Ki Supriyoko (2006) memandang UN untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK perlu dilaksanakan dengan alasan: (1) sebagai tolok ukur kualitas pendidikan antardaerah; (2) upaya standarisasi mutu pendidikan secara nasional; (3) memotivasi peserta didik, orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam mencapai standar pendidikan. Furqon (2009) dalam studinya menyimpulkan bahwa UN: (1) mendorong guru meningkatkan kualitas mengajar; (2) meningkatkan upaya-upaya bimbingan terhadap siswa yang berkesulitan belajar; (3) mendorong guru menerapkan berbagai metode untuk memperbaiki pembelajaran; (4) siswa lebih rajin dan giat belajar; dan (5) orang tua lebih memperhatikan belajar anaknya. Setali tiga uang, Dejmary Mardapi (2007) mencatat beberapa temuan positif sebagai dampak UN,

yakni: (1) siswa lebih semangat belajar, rajin mencari sumber bacaan, dan rajin masuk sekolah; (2) guru lebih giat mengajar, meningkatkan motivasi berprestasi, dan meningkatkan disiplin; dan (3) orang tua lebih memperhatikan proses pembelajaran anak dan memberikan dorongan untuk belajar.

Dengan demikian, melalui UN, para peserta didik belajar mengendalikan dan mengatur dirinya agar dapat lulus dan berprestasi dalam ujian. Para guru belajar melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi, UN yang dikelola, dipersiapkan, dan dilaksanakan dengan baik dapat memberikan keyakinan kepada peserta didik bahwa prestasi dalam UN yang diperolehnya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan hadiah guru, sekolah, atau bimbingan belajar. UN akan menumbuhkan kesadaran pada peserta didik bahwa tidak ada orang lain atau kekuatan eksternal lainnya yang dapat membantu dirinya kecuali kemampuan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika peserta didik tidak lulus UN, dengan karakter yang baik yang baik, ia akan bertawakal dan tidak meletakkan kesalahan tersebut kepada pihak lain di luar dirinya.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas UN memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai

tujuan pendidikan nasional dan cita-cita bangsa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian UN perlu terus dilaksanakan dengan berbagai penyempurnaan secara berkesinambungan dalam upaya turut membina karakter bangsa.

Pengelolaan, persiapan dan pelaksanaan UN yang baik akan menjadi alat intervensi pembudayaan karakter bangsa sekaligus menjadi instrumen keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara UN dengan pendidikan karakter bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Armando, dkk. Refleksi Karakter Bangsa. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Jakarta. 2008. hal 8

Furqon dkk. (2009). Studi Pengembangan Lembaga Pengujian Independen. Laporan penelitian.

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter\\_bangsa&oldid=3952377](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter_bangsa&oldid=3952377)

<http://www.fpk.or.id/2011/02/pendidikan-karakter-bangsa/>

Kemdiknas (2010). Pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Mardapi,D. (2007). *Laporan Pelaksanaan UN 2007*, Dikdasmen, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Supriyoko, K., (2004), *Studi Aspirasi Masyarakat tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional*. Laporan Penelitian, LSPI Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zainul,A. (1997). *“Locus of Control “, Self Esteem, dan Tes Baku*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Bandung, 27 Februari.

# PENGUASAAN MATERI PUISI PADA SISWA SMA IPA DAN IPS BERDASARKAN HASIL UN 2011-2012

Safari

Peneliti Utama di Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud

E-mail : safari\_puspendik@yahoo.com.

## **ABSTRACT**

*The objective of this research is to answer the following questions. Is the Science Class student of Senior High School's achievement in poetry topics in the National Final Examination (UN) throughout Indonesia the same with the Social Class student of Senior High School's achievement? Is there any difference in the student's achievement between Science class and Social class of Senior High School? The results of the variant analysis are as follows. First, it shows that the achievement of the Science Class student of Senior High School's is better than the social senior high school students'. The science class students' achievement in determining the elements of the poetry (Mean 65,68 and SD 11,81) is better than the social class students' (mean 61,75 and SD 12,22). The science class students' achievement in determining the main topics of poems, pantun, and gurindam (mean 74,52 and SD 7,57) is also better than the social class students' (mean 68,28 and SD 8,78). The science class students' achievement in completing the poetry' verse with rhyming words (mean 76,89 and SD 7,65) is also better than the social class students' (mean 71,32 and SD 8,90). Second, it shows that there are different achievement in poetry topics between science and social class student of senior high school. There are significant differences in poetry topics in determining the main topics of poems, pantun, and gurindam ( $P$ -value = 0,003) and completing the poetry's verse with rhyming words ( $P$ -value = 0,008). Meanwhile, there isn't different students' achievement in determining the elements of the poetry ( $P$ -value = 0.189).*

**Keywords:** *poetry, Senior High School, Science, Social, National Final Examination.*

## **ABSTRAK**

*Tujuan utama studi ini adalah menjawab pertanyaan berikut. Apakah tingkat kemampuan siswa SMA IPA dan IPS untuk penguasaan materi puisi yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia adalah sama? Apakah terdapat perbedaan tingkat kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap penguasaan materi puisi? Berdasarkan hasil analisis varian satu jalur diperoleh hasil seperti berikut. **Pertama**, dari ketiga kemampuan yang telah diujikan menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMA IPA lebih baik daripada kemampuan siswa SMA IPS. Untuk materi “menentukan unsur intrinsik puisi” siswa SMA IPA (Mean 65,68 dan SD 11,81) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (Mean 61,75 dan SD 12,22). Materi “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam” siswa SMA IPA (Mean 74,52 dan SD 7,57) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (Mean 68,28 dan SD 8,78). Materi “melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas) siswa SMA IPA (Mean 76,89 dan SD 7,65) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (Mean 71,32 dan SD 8,90). **Kedua**, terdapat perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kedua materi puisi. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi puisi, “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam ( $P\text{-value}= 0,003$ ), dan “melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas) ( $P\text{-value}=0,008$ ). Adapun untuk materi “menentukan unsur intrinsik puisi” tidak terbukti adanya perbedaan yang signifikan ( $P\text{-value}= 0,189$ ).*

**Kata kunci:** puisi, SMA, IPA, IPS, UN.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang dan Masalah

Pengajaran puisi di SMA IPA dan IPS termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia yang mengajarkan tiga kompetensi dasar bahasa yaitu tata bahasa, kemampuan bahasa, dan kesusastraan. Namun dalam kenyataannya kompetensi yang banyak diajarkan lebih banyak tata bahasa dan kemampuan bahasa daripada kesusastraan. Dalam pelajaran kesusastraan, peserta didik hanya menghafal. Peserta didik menghafal seperti: bagaimana bentuk pantun, soneta, seloka, judul-judul buku sekaligus pengarangnya, tokoh-tokoh, tahun penerbitan dll. Adapun pelajaran “apresiasi” sangat asing bagi peserta didik. Dengan pengajaran yang hanya bersifat hafalan ini peserta didik hanya menghafal tanpa melatih dirinya mengapresiasi atau mengenali karya-karya sastra.

Memang, pengajaran apresiasi agak sulit dan bagi guru diperlukan waktu untuk mengajarkan. Kadangkala penguasaan siswa lebih tinggi karena sumber informasi yang dimiliki siswa lebih banyak dari pada yang dimiliki guru. Oleh karena itu, guru jarang memberikan pelajaran apresiasi sastra (puisi). Ada beberapa alasan mengapa terjadi hal tersebut. Pertama, guru tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang kesusastraan. Kedua, sumber bacaan, rujukan,

informasi yang dimiliki guru terbatas bahkan siswa lebih bisa mengakses sumber informasi tersebut. Ketiga, persepsi di masyarakat bahwa guru harus lebih “pintar” dari pada siswa. Ketiga hal tersebut menyebabkan guru menghindari atau melewatkan pembelajaran sastra.

Pelajaran puisi penting untuk memperkaya ruang batin siswa. Akan tetapi saat ini pelajaran puisi di SMA dianggap pelajaran yang tidak terlalu penting bagi masa depan, sehingga pelajaran puisi dianggap pelajaran yang membosankan. Sudah saatnya pelajaran puisi di SMA baik IPA maupun IPS harus ditunjukkan untuk memperkaya ruang batin siswa. Dengan memperkaya ruang batin siswa, sekolah tidak menjadi mesin pencetak manusia yang tidak mempunyai nilai-nilai luhur dan tidak menghormati lingkungannya, tetapi sekolah menjadi tempat bagi siswa untuk berproses menjadi pribadi yang berkompeten dan tidak mengukur segala sesuatu dengan materi. Salah satu persoalan klasik yang sering dituding menjadi penyebab kurang menariknya pelajaran apresiasi puisi adalah pemilihan bahan ajar. Bahan ajar sekadar diambil dari buku teks yang belum tentu cocok dengan tingkat kemampuan berbahasa, perkembangan jiwa, dan latar belakang budaya peserta didik. Dalam kondisi seperti ini, guru bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan apresiasi puisi di sekolah. Selain terbatasnya ketersediaan buku sumber di perpustakaan sekolah dan sistem penilaiannya

di sekolah yang kurang sah, kurikulum juga dianggap sebagai faktor yang tak dapat diabaikan.

Permasalahan di atas menjadi semakin rumit manakala semua pihak menggugat dan menyandarkan harapan yang terlalu besar pada pembelajaran apresiasi puisi, yang pada kenyataannya tidak diajarkan oleh pendidik, sehingga membuat daya apresiasi dan minat siswa terhadap pembelajaran apresiasi puisi tidak berkembang. Pembelajaran puisi yang seharusnya menjadi pelajaran yang menyenangkan dan mengajak siswa mengapresiasi kreativitas siswa lewat puisi justru yang terjadi sebaliknya. Sekarang masalah yang muncul adalah apakah kemampuan siswa SMA IPA terhadap materi puisi selalu lebih tinggi daripada kemampuan siswa SMA IPS? Apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan siswa SMA IPS terhadap materi puisi?

### **Rumusan Masalah**

Dari berbagai uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut. **Pertama**, apakah tingkat penguasaan siswa SMA IPA dan SMA IPS terhadap materi puisi yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia adalah sama? **Kedua**, apakah terdapat perbedaan tingkat penguasaan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi puisi? Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan tujuan utama dalam penelitian ini.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah seperti berikut ini. **Pertama**, untuk menentukan apakah tingkat penguasaan siswa SMA IPA dan IPS untuk materi puisi yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia adalah sama. **Kedua**, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat penguasaan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi puisi.

### **KAJIAN LITERATUR**

Penguasaan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi puisi yang termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang di-UN-kan tergantung pada tingkat penguasaan materi yang berkaitan dengan karya sastra yang telah diajarkan guru di sekolah. Sebuah karya sastra pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang unsur-unsurnya terkait secara padu (Hawkes, 1978: 18). Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya sastra tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkannya dengan keseluruhan karya sastra itu sendiri. Analisis unsur-unsur harus diletakkan dalam konteks karya sastra sebagai keutuhan yang padu, yang tidak terbelah-belah. Sebuah karya sastra, termasuk puisi, pada dasarnya adalah sebuah struktur yang kompleks (Hill, 1966: 6). Oleh karena itu, untuk memahami sebuah karya sastra, terutama puisi,

terlebih dahulu menganalisis dan memahami strukturnya yang kompleks itu.

Abrams memberikan empat unsur pendekatan yang utama terhadap karya sastra, yaitu (1) pendekatan yang menitikberatkan karya sastra itu sendiri, disebut objektif (work), (2) pendekatan yang menitikberatkan penulis, disebut ekspresif (artist); (3) pendekatan yang menitikberatkan semesta, disebut mimetic (universe); (4) pendekatan yang menitikberatkan pembaca disebut pragmatic (audience) (Abrams, 1959: 6-29). Penyair dalam menciptakan karyanya memiliki kebebasan yang dikenal dengan istilah *licentia puitica*. Dengan *licentia puitica* penyair bebas menuangkan idenya dan keluar dari konvensi-konvensi yang ada. Hal ini sesuai dengan pandangan Lodge (Pradopo, 1987: 14) yang menyatakan bahwa setiap penulis melaksanakan “tanda tangannya” sendiri yang khusus dalam cara penggunaan bahasanya dan membedakannya dari karya penulis lain. Oleh karena itu, dalam penulisan biografi ada tiga sudut pandang yang mendasar dan relevan dengan studi sastra, yaitu (1) menganggap bahwa biografi menerangkan dan menjelaskan proses penciptaan karya sastra yang sebenarnya; (2) mengalihkan pusat perhatian dari karya ke pribadi pengarang; (3) memperlakukan biografi sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan atau psikologi penciptaan artistik (Wellek & Warren, 1954: 67).

Penyusunan puisi yang baik tergantung pada pemilihan katanya yang tepat. Diksi adalah

pilihan kata. Dengan pilihan kata yang tepat, penyair pada umumnya ingin mencurahkan perasaan dan pikiran dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang dialami batinnya. Atau dengan kata lain, dengan diksi yang tepat akan tercapai ekspresi yang dapat menjelmakan pengalaman jiwa ataupun suasana batin yang ada pada diri penyair. Diksi yang tepat juga akan menimbulkan kepuhutan sehingga pada akhirnya diperoleh nilai estetika (Pradopo, 1987: 54). Di samping itu, diksi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pilihan kata yang bersinonim, bersamaan, ataupun hamper bersamaan maknanya. Diksi juga menyangkut pemakaian kata yang bersifat pilihan di antara kata-kata abstrak atau konkret, kata-kata sehari-hari atau arkais, kata-kata yang bersifat literal atau figuratif (Abrams, 1988: 142-143).

Dari berbagai uraian teori di atas muncullah permasalahan dalam penelitian ini. Apakah terdapat perbedaan tingkat penguasaan siswa SMA IPA dan SMA IPS terhadap materi puisi yang di-UN-kan di 33 provinsi di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode survei. Dasar penggunaan metode survei adalah disesuaikan dengan tujuan utama penelitian ini di antaranya adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan



secara faktual berdasarkan data penelitian ini. Pada penelitian ini dilakukan kajian penguasaan siswa pada 3 butir soal yang berkaitan dengan materi puisi. Alasan pemilihan adalah hanya tiga butir soal yang menanyakan materi puisi dari 50 soal Bahasa Indonesia pada UN. Data dalam penelitian ini berbentuk skor tes yang dijawab siswa SMA IPA dan IPS di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah siswa SMA IPA yang mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2011/2012 adalah 585125 siswa yang belajar di 8868 SMA dan SMA IPS adalah 617522 siswa yang belajar di 10336 SMA. Jumlah SMA dan siswa di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah SMA IPA dan IPS serta Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 di 33 Provinsi

No.	Provinsi	Jml SMA IPA	Jml Siswa SMA IPA	Jml SMA IPS	Jml Siswa SMA IPS
1.	DKI Jakarta	384	21343	447	28169
2.	Jawa Barat	994	82538	1162	73434
3.	Jawa Tengah	689	54746	831	61990
4.	DI Yogyakarta	135	7854	163	7636
5.	Jawa Timur	920	72732	1175	66872
6.	Aceh	378	27760	319	17294
7.	Sumatera Utara	815	56280	775	44620
8.	Sumatera Barat	228	17527	250	20559
9.	Riau	279	17730	329	21857
10.	Jambi	156	8794	191	11024
11.	Sumatera Selatan	401	24840	495	31055
12.	Lampung	271	17014	379	22244
13.	Kalimantan Barat	208	7270	310	17604
14.	Kalimantan Tengah	138	4871	171	7381
15.	Kalimantan Selatan	135	6169	158	8749
16.	Kalimantan Timur	165	8824	233	11232

17.	Sulawesi Utara	158	6599	195	6720
18.	Sulawesi Tengah	137	7713	152	8271
19.	Sulawesi Selatan	413	31828	431	25636
20.	Sulawesi Tenggara	171	10606	204	11367
21.	Maluku	184	7078	200	10385
22.	Bali	125	12835	145	7627
23.	NTB	184	12883	232	13679
24.	NTT	253	9318	272	19981
25.	Papua	130	5614	156	7613
26.	Bengkulu	93	5493	114	6981
27.	Maluku Utara	126	4837	116	4434
28.	Bangka Belitung	53	2310	64	3504
29.	Gorontalo	45	2642	45	3448
30.	Banten	309	20845	395	23331
31.	Kepulauan Riau	73	3200	89	5796
32.	Sulawesi Barat	50	2790	58	3624
33.	Papua Barat	68	2242	80	3405
	Nasional	8868	585125	10336	617522

Sumber: Puspendik, Balitbang Kemdikbud 2012

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian satu jalur. Analisis varian dipergunakan untuk menghitung perbedaan hasil UN pada ketiga materi yang berhubungan erat dengan puisi yaitu materi “menentukan unsur intrinsik puisi”, “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam”, dan “melengkapi larik puisi lama/beru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas). Pada siswa SMA IPA dan IPS. Agar hasil analisis penelitian ini dapat diperoleh secara akurat, maka semua data dalam penelitian ini diolah atau dianalisis dengan mempergunakan program SPSS 20.00.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Menentukan unsur-unsur intrinsik puisi

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “menentukan unsur intrinsik puisi” adalah tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “menentukan unsur intrinsik puisi” di 33 provinsi

SMA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. IPA	33	65,6767	11,80816	2,05554
2. IPS	33	61,7500	12,22227	2,12762

Berdasarkan data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa kemampuan menentukan unsur intrinsik puisi pada siswa SMA IPA (Mean 65,68 dan SD 11,81) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (mean 61,75 dan SD 12,22).

Tabel 3 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 3 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,066	1	64	,797

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	254,409	1	254,409	1,762	,189
Within Groups	9242,135	64	144,408		
Total	9496,543	65			

Tabel 4 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan menentukan unsur intrinsik puisi adalah tidak terbukti. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan menentukan unsur intrinsik puisi (P-value= 0,277).

### 2. Menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam” adalah tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam” di 33 Provinsi

SMA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. IPA	33	74,5230	7,57177	1,31808
2. IPS	33	68,2752	8,78040	1,07371

Berdasarkan data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa kemampuan menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam pada siswa SMA IPA (Mean 74,52 dan SD 7,57) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (Mean 68,28 dan SD 8,78).

Tabel 6 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 6 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,599	1	64	,442

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	644,094	1	644,094	9,583	,003
Within Groups	4301,671	64	67,214		
Total	4945,765	65			

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam adalah terbukti. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam (P-value = 0,003).

### 3. Melengkapi lirik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/ berima/ bermajas)

Berdasarkan nilai rata-rata nasional, antara kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “melengkapi lirik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/ bermajas)” adalah tidak sama. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Skor Siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi “melengkapi lirik puisi lama/baru dengan kata kias/berlambang/berima/ bermajas” di 33 Provinsi

SMA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1. IPA	33	76,8882	7,64858	1,33145
2. IPS	33	71,3173	8,89881	1,54908

Berdasarkan data dalam tabel 8 menunjukkan bahwa kemampuan melengkapi larik puisi lama/baru dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas pada siswa SMA IPA (mean 76,89 dan SD 7,65) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (mean 71,32 dan SD 8,90).

Tabel 9 berikut merupakan hasil uji homogenitas setiap data dalam variabel sebelum dianalisis dengan analisis varian satu jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel adalah homogen (Sig. > 0,05).

Tabel 9 Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,477	1	64	,492

Karena kedua variabel adalah homogen, variabel itu dapat dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan hasilnya seperti pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10 ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	512,078	1	512,078	7,438	0,008
Within Groups	4406,069	64	68,845		
Total	4918,147	65			

Tabel 10 menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan melengkapi larik puisi lama/baru

dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas adalah terbukti. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kemampuan melengkapi larik puisi lama/baru dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas (P-value = 0,008).

Berdasarkan semua hasil analisis di atas menunjukkan bahwa dari ketiga kemampuan yang telah diujikan menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMA IPA lebih baik daripada kemampuan siswa SMA IPS. Di samping itu, terdapat perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kedua materi puisi "menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam (P-value= 0,003) dan "melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas) (P-value=0,008) adalah terbukti. Adapun untuk materi "menentukan unsur intrinsik puisi" tidak terbukti adanya perbedaan (P-value= 0,189). Sebenarnya materi-materi penting puisi yang diajarkan di sekolah masih banyak. Hanya sebagai sampel dalam penelitian ini atau yang diujikan dalam UN terbatas hanya 3 butir soal saja. Hal ini membuktikan bahwa materi puisi atau sastra yang diujikan masih terlalu sedikit dan materi-materi penting yang lainnya seharusnya ditanyakan guru pada ujian sekolah karena sebuah karya sastra pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang unsur-unsurnya terkait secara padu (Hawkes, 1978: 18). Sebuah karya sastra, termasuk puisi, pada dasarnya adalah

sebuah struktur yang kompleks (Hill, 1966: 6). Oleh karena itu, untuk memahami sebuah karya sastra, terutama puisi, terlebih dahulu menganalisis dan memahami strukturnya yang kompleks itu. Abrams memberikan empat unsur pendekatan yang utama terhadap karya sastra, yaitu (1) pendekatan yang menitikberatkan karya sastra itu sendiri, disebut objektif (work), (2) pendekatan yang menitikberatkan penulis, disebut ekspresif (artist), (3) pendekatan yang menitikberatkan semesta, disebut mimetic (universe), (4) pendekatan yang menitikberatkan pembaca disebut pragmatic (audience) (Abrams, 1959: 6-29).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan semua uraian di atas, hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya temuan-temuan dan saran seperti berikut ini.

**Pertama**, klasifikasi kemampuan siswa SMA IPA dan IPS adalah seperti berikut. Dari ketiga kemampuan yang telah diujikan menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMA IPA lebih baik daripada kemampuan siswa SMA IPS. Untuk materi “menentukan unsur intrinsik puisi” siswa SMA IPA (Mean 65,68 dan SD 11,81) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (mean 61,75 dan SD 12,22). Materi “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam” siswa SMA IPA (mean 74,52 dan SD 7,57) adalah lebih baik

daripada siswa SMA IPS (Mean 68,28 dan SD 8,78). Materi “melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas) siswa SMA IPA (mean 76,89 dan SD 7,65) adalah lebih baik daripada siswa SMA IPS (mean 71,32 dan SD 8,90).

**Kedua**, perbedaan kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap kedua materi puisi adalah terbukti. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa SMA IPA dan IPS terhadap materi puisi, “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam (P-value=0,003) dan “melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas) (P-value=0,008). Adapun untuk materi “menentukan unsur intrinsik puisi” tidak terbukti adanya perbedaan (P-value=0,189).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada dua saran penting seperti berikut ini. **Pertama**, kepada kepala sekolah SMA. Memang puisi itu sukar hadir di tengah-tengah peserta didik karena kondisi peserta didik yang berbeda atau bertolak belakang dengan puisi itu sendiri. Mungkin peserta didik masih belum menganggap sastra sebagai bagian dari kebutuhan hidup, yaitu peserta didik bisa hidup tanpa sastra. Dalam hal ini diperlukan upaya bagaimana peserta didik dapat menerima karya sastra (puisi) sebagai kancah dalam kehidupannya. Salah satu jalanyaitu melalui pengajaran sastra yang tepat di sekolah dengan memperhatikan: (1) pentingnya menempatkan

guru yang khusus mengajarkan sastra dan benar-benar menguasai seluk beluk sastra; (2) pentingnya pelajaran apresiasi sastra/puisi; (3) pentingnya memilih puisi-puisi sebelum pelajaran apresiasi diberikan; (4) perlunya mengajak peserta didik untuk ikut serta mengapresiasi karya sastra sehingga peserta didik sebagai anggota masyarakat dapat melibatkan pribadinya dalam karya sastra. **Kedua**, kepada guru khususnya guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia baik yang mengajar di SMA IPA maupun di SMA IPS perlu memberi contoh dan praktik yang konkret yang diprioritaskan pada materi dengan daya serap UN yang masih rendah khususnya pada materi “menentukan isi puisi lama, pantun, gurindan” dan “melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas).” Di samping itu, sudah saatnya guru mengajarkan prinsip pembelajaran puisi, di antaranya adalah: (1) guru harus menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran puisi dengan cara mengaitkan dengan tokoh-tokoh yang sudah sukses dalam bidang puisi, misalnya W.S. Rendra dan tokoh lainnya; (2) guru harus mengarahkan siswa untuk mengenal secara umum hal yang berkaitan dengan puisi. (3) guru harus mengarahkan siswa untuk mengenal konsep puisi dan memahami bagian-bagian puisi yang telah mereka tulis; (4) guru harus mempraktikkan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa peserta didik tahu dan berhasil menulis puisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M.H. (1958). *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. New York: The Norton Library.
- Abrams, M.H. (1988). *A Glossary of Literary Terms*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Ins.
- Hawkes, Terence. (1978). *Structuralism and Semiotics*. London: Methuen & Co. Ltd.
- Hill, Knox C. (1966). *Interpreting Literature*. Chicago: The University Press of Chicago.
- Pradopo, Rachmat Djoko. (1987). *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. (1989). *Teori Kesusastraan* (diindonesiakan oleh Melani Budianta). Jakarta: Gramedia.

# UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN 2012 DI PROVINSI GORONTALO

Rogers Pakpahan

Peneliti di Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud

E-mail: ropakpakro@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*This article gives explanation and information of the Equality Education National Final Examination (UNPK) organization in Gorontalo Province. It explains the UNPK's instrument distribution, committee, socialization, implementation, passing criteria, and difficultness level according to the test participants. The data was taken from the province and regency UNPK's committee, schools, and students. The UNPK in Gorontalo is well organized, appropriate with the UNPK's Standard Operational Procedure (SOP). The instrument distribution was done by the committee based on their responsibility. The participants of the test hope that the passing criteria in the next UNPK will be the same. The recent passing criteria had increased students' learning enthusiasm and forced The Independent Learning Center (PKBM)'s to increase their students' knowledge. The UNPK's most difficult subject is Mathematics, while the easiest one is PKn.*

**Keywords:** Equality Education, UNPK, SOP, socialization, passing criteria.

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini merupakan gambaran atau informasi penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di Provinsi Gorontalo. Ruang lingkup tulisan meliputi proses pendistribusian bahan ujian, kepanitiaan, sosialisasi, pelaksanaan ujian di satuan pendidikan, kriteria kelulusan, dan tingkat kesukaran soal menurut peserta ujian. Sumber data berasal dari panitia provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan peserta didik. Penyelenggaraan UNPK di Provinsi Gorontalo sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur operasional standar (POS). Pendistribusian dokumen yang menunjang penyelenggaraan ujian dilakukan panitia sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kriteria kelulusan untuk sementara diharapkan tetap dan telah berhasil memacu semangat belajar peserta didik dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) berupaya untuk meningkatkan pengetahuan peserta didiknya. Materi UNPK yang dianggap paling sukar Matematika dan paling mudah PKN.*

**Kata kunci:** Pendidikan Kesetaraan, UNPK, POS, sosialisasi, kriteria kelulusan.

## PENDAHULUAN

Dalam proses pembelajaran selalu ada interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik (guru, tutor, dosen) untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dilakukan penilaian sebagai kegiatan yang terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian proses pembelajaran sehingga hasil penilaian mampu menampilkan hasil pembelajaran (Prayitno, 2009). Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mengkhususkan pendidikan bagi masyarakat yang terkendala memasuki pendidikan formal. Pendidikan Kesetaraan dikategorikan sebagai pendidikan nonformal namun demikian interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik selalu ada dalam proses pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran pencapaian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung maka pada akhir masa pembelajaran dilakukan penilaian untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran (Kusaeri dan Suprananto, 2012) dalam bentuk ujian akhir, yang dewasa ini dilakukan oleh pemerintah yaitu UNPK.

UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan (Permen Dikbud, 2012). UNPK merupakan bagian dari evaluasi seperti yang diamanatkan

oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli 2012 dan Oktober 2012. UNPK yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk mengukur perkembangan kompetensi peserta didik dan untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C memiliki eligibilitas yang sama dan setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Dengan adanya eligibilitas yang dimiliki peserta didik Pendidikan Kesetaraan maka UNPK semakin diperlukan terutama untuk mengukur kompetensi pengetahuan peserta didik terutama selama belum ada lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

UNPK pada awalnya disebut Ujian Nasional Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai pengganti Ujian Persamaan pada sekolah-sekolah malam. Penyelenggaraan UNPK mendapat sorotan masyarakat terutama karena proses pengolahan hasil ujian yang relative lama sehingga hasilnya tidak dapat digunakan peserta didik untuk mendaftar ke pendidikan selanjutnya pada tahun yang sama, selain itu materi tesnya relatif berbeda dengan materi ujian akhir di satuan pendidikan formal. Untuk itu pemerintah (Kemdikbud) melakukan perbaikan terutama dalam hal pengumuman hasil dan materi tes. Materi tes untuk UNPK disetarakan dengan materi Ujian Nasional satuan pendidikan formal. Jumlah paket soal untuk



Program Paket A adalah satu paket sedangkan untuk Program Paket B dan Paket C disediakan dua paket soal paralel dalam satu ruang ujian. Peserta UNPK adalah peserta didik dari Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan peserta didik yang tidak lulus dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.

Untuk memperoleh informasi pelaksanaan UNPK Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang diselenggarakan satuan pendidikan atau Pusat Kegiatan Mengajar (PKM) secara serentak di Indonesia maka diperlukan dilakukan pemantauan. Tulisan ini khusus pelaksanaan UNPK Program Paket A dan Program Paket B di Provinsi Gorontalo. Informasi yang diharapkan dari hasil pemantauan yaitu tentang pendistribusian naskah ujian, kepanitiaan, sosialisasi, pelaksanaan ujian, kriteria kelulusan, dan tingkat kesukaran soal menurut peserta ujian. Informasi tersebut dikaitkan dengan upaya yang telah dilakukan Kemdikbud untuk menyempurnakan pelaksanaan UNPK.

## **KAJIAN LITERATUR**

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional, yang terdiri atas Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara

SMA/MA. Pendidikan kesetaraan menekankan penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Peserta didik Pendidikan Kesetaraan adalah masyarakat yang terkendala memasuki jalur pendidikan formal karena berbagai hal baik karena alasan ekonomi, ketiadaan sarana pendidikan, maupun hal-hal lain yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B dimaksudkan untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sedang Paket C dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan menengah serta untuk meningkatkan rata-rata lama belajar dan produktivitas warga negara yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Sasaran peserta didik pendidikan Kesetaraan dapat berupa sekolah rumah, sekolah alternatif, petani, para pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, nelayan, pondok pesantren, dan anak jalanan.

Mata pelajaran dalam Pendidikan Kesetaraan sama dengan mata pelajaran pendidikan formal, dan keterampilan fungsional sesuai dengan sasaran peserta didik. Proses pembelajaran dalam Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan interaktif dimana terjadi interaksi antara tutor dengan peserta didik, pendekatan kooperatif dilakukan antara sesama peserta

didik yang menguasai materi kepada yang lain serta pendekatan penugasan atau diskusi. Dalam proses pembelajaran terkandung tiga unsur yang saling memengaruhi yaitu tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, dan hasil belajar yang diperoleh melalui penilaian (Muslich, 2010). Bentuk penilaian yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan adalah tes lisan di kelas, kuis, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, laporan praktikum, ujian praktik, ujian akhir (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Ujian akhir yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut UNPK untuk paket C meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk Paket A dan Paket B meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pemilihan mata pelajaran tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran dasar yang diperlukan seseorang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Peserta didik yang telah mengikuti UNPK diberi surat tanda lulus. Surat tanda lulus adalah surat pernyataan bagi peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti UNPK dan berisi nilai-nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan. Hasil kelulusan UNPK

digunakan sebagai alat pengambil keputusan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dan tingkat pencapaian prestasi peserta didik dari tujuan pembelajaran. Hasil suatu asesmen menggambarkan kemampuan atau prestasi belajar peserta didik (Popham, 1999). Sesuai dengan karakteristik Pendidikan Kesetaraan bahwa setiap peserta didik memiliki eligibilitas maka bahan ujian hendaknya dikembangkan sesuai dengan perkembangan teori tes dan perkembangan teknologi di bidang pengujian (Suryabrata, 2000) supaya hasil pengukuran dapat dipercaya. Agar hasil UNPK dapat diperbandingkan maka diperlukan penentuan standar *setting* (Bond, 2001) dalam hal ini disebut kriteria kelulusan.

### **Pelaksanaan Ujian Nasional**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, UNPK digunakan untuk: a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Agar hasil UNPK dapat meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan maka informasi pemetaan hasil UNPK harus segera disusun dan dikirimkan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian hasil UNPK dapat digunakan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan oleh pemerintah, satuan pendidikan terhadap orang tua/masyarakat yang dilakukan secara berjenjang.

Untuk memperoleh informasi penyelenggaraan UNPK di Provinsi Gorontalo digunakan instrumen berupa kuesioner dan pemantauan secara langsung di lokasi penyelenggaraan. Sumber informasi adalah panitia di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di lokasi penyelenggaraan, dan peserta ujian. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mendatangi para petugas panitia dan peserta didik di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Agar tidak mengganggu peserta didik yang sedang mengikuti ujian maka pengisian kuesioner dan wawancara dilakukan setelah ujian berlangsung sedang pada panitia dilakukan pada saat ujian berlangsung. Aspek-aspek yang diungkap dalam instrumen meliputi proses pendistribusian naskah ujian nasional oleh dinas pendidikan ke lokasi penyelenggaraan, kepanitiaan, sosialisasi, pelaksanaan ujian di lokasi penyelenggaraan, kriteria kelulusan, dan tingkat kesukaran soal menurut peserta ujian. Berikut hasil pengolahan dari berbagai informasi yang sudah dikumpulkan.

Pendistribusian bahan ujian dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Bahan ujian didistribusikan dari perusahaan percetakan yang

ada di ibukota provinsi. Naskah disimpan di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) yang terdekat dengan lokasi penyelenggaraan UNPK hingga mudah diambil atau dijangkau oleh penyelenggara ujian. Distribusi bahan ujian setiap hari dijemput panitia penyelenggara dari kantor Polsek yang ditentukan sedang hasilnya dikumpulkan di dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Pada hari terakhir hasil ujian atau lembar jawaban UNPK diantarkan atau diserahkan panitia penyelenggara kabupaten/kota ke panitia penyelenggara provinsi untuk diproses lebih lanjut. Pengamanan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian. Hasil dari wawancara dengan panitia dinyatakan bahwa kualitas cetakan bahan ujian sudah sesuai dengan POS.

Kepanitian di tingkat provinsi disusun menurut struktur organisasi yang ada. Kepanitiaan terdiri atas unit (bidang) yang menangani persekolahan, Kanwil Kemenag provinsi, dan unit yang terkait dengan pelaksanaan UNPK di lingkungan dinas pendidikan. Kepanitian di tingkat kabupaten/kota dan panitia penyelenggara disatukan mengingat bentuk penyelenggaraan yang terpusat di beberapa lokasi. Dalam struktur kepanitian mengikutsertakan para pengelola atau penanggungjawab PKBM yang ada di kabupaten/kota.

Informasi pelaksanaan UNPK disosialisasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) kepada dinas pendidikan provinsi. Selanjutnya dilakukan sosialisasi secara berjenjang, dinas pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama provinsi. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota kepada tutor, pembina/penyelenggara kelompok belajar, dan pemangku kepentingan lain. Dalam acara sosialisasi ini diserahkan dokumen pendukung pelaksanaan Ujian nasional berupa Permen Dikbud Nomor 35 Tahun 2012, POS, kisi-kisi UNPK. Dari hasil wawancara dengan beberapa penyelenggara Program Paket A dan Paket B, banyak diantara mereka yang tidak paham dengan penyelenggaraan UNPK karena penyelenggara lebih banyak melibatkan staf dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan UNPK dipusatkan di satu lokasi baik di tingkat kota dan kabupaten. Lokasi penyelenggaraan di Kota Gorontalo dipusatkan di satu lokasi sedangkan untuk kabupaten yang relatif luas wilayahnya lokasi penyelenggaraan dipusatkan di kota kecamatan. Oleh karena itu bahan ujian ditempatkan di Polsek tempat penyelenggaraan. Pelaksanaan UNPK menggunakan gedung satuan pendidikan seperti SD dan SMP sehingga kondisi ruangnya layak digunakan untuk penyelenggaraan ujian. Peserta ujian dalam satu lokasi berasal dari beberapa PKBM kecuali yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) hanya warga binaannya saja. Peserta

UNPK sebagian besar adalah peserta didik PKBM, sedangkan peserta ujian yang berasal dari peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional sekolah formal sedikit. Jadwal pelaksanaan UNPK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu di mulai pukul 13.00 waktu setempat. Pengawas ruang ujian berasal dari guru sekolah lokasi penyelenggaraan ujian dan tutor PKBM. Pengawas dalam satu ruangan berjumlah dua orang. Naskah ujian untuk Paket B dalam satu ruangan terdapat dua paket sedangkan untuk Paket A hanya satu paket. Naskah ujian diambil panitia dari Polsek penyimpanan naskah setiap harinya demikian hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan di dinas pendidikan kabupaten/kota selanjutnya dikirimkan ke provinsi.

Kriteria kelulusan UNPK ditentukan nilai rata-rata akhir (NA) semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). NA merupakan gabungan nilai rata-rata laporan hasil belajar dengan nilai UNPK dengan perbandingan 60 : 40. Artinya nilai UNPK diakui 0,6 dan nilai lapran hasil belajar 0,4. Adanya kriteria kelulusan mendorong peserta didik maupun PKBM untuk meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar para tutor ataupun pengelola PKBM kurang memahami kriteria kelulusan ini dan cenderung menyerahkan masalah itu kepada staf dinas pendidikan untuk menjelas-

kan kriteria kelulusan kepada peserta didik di setiap PKBM.

Informasi tingkat kesukaran UNPK menurut peserta didik untuk Paket A paling sukar secara berurutan adalah Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Untuk Paket B adalah Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Tujuan peserta ujian mengikuti UNPK Paket B adalah untuk mencari pekerjaan, sedangkan Paket A untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Adanya wacana untuk menyatukan penyelenggaraan UNPK bersamaan dengan Ujian Nasional, sebagian besar responden kurang sependapat karena pada saat yang bersamaan sulit untuk menemukan tempat penyelenggaraan yang baik seperti gedung sekolah.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan Ujian UNPK tahun pelajaran 2011/2012 tahap I di Gorontalo telah berjalan sesuai dengan ketentuan POS. Hal itu tampak dalam pendistribusian naskah ujian yang dilakukan bersama antara dinas pendidikan dan aparat keamanan, kepanitian sudah mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan dari provinsi kepada kabupaten/kota, dan untuk

tingkat PKBM dilakukan bersamaan dengan pendistribusian dokumen pelaksanaan UNPK. Pelaksanaan ujian berjalan lancar, seluruh bahan ujian lengkap, pengawas ruang ujian adalah guru dan tutor. Peserta didik telah memiliki kisi-kisi sebelum ujian dan mereka telah melakukan persiapan dengan cara belajar mandiri, diskusi, atau belajar tambahan di PKBM masing-masing. Mengenai wacana pelaksanaan UNPK dengan Ujian Nasional masih perlu dipertimbangkan terutama untuk ketersediaan gedung atau ruang ujian.

- Pola pendistribusian naskah UNPK tetap dipertahankan seperti sekarang sedangkan sosialisasi perlu ditingkatkan pelaksanaannya hingga seluruh pemangku kepentingan memahaminya.
- Kriteria kelulusan perlu dipertahankan dan pengiriman dokumen bahan UNPK agar segera diberikan kepada para pengelola PKBM sehingga persiapan ujian lebih baik.
- Pelaksanaan UNPK tetap dipisah dari Ujian Nasional dilakukan seperti sekarang ini, agar kesediaan gedung atau ruang ujian untuk UNPK dapat lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bond., Trevor.G., dan Fox., ChristinnM., (2001) *Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences* London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Himpunan Peraturan Pemerintah/ Ketentuan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional
- (2007). *Acuan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- (2007). *Acuan Penilaian Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Guion, Robert M., dan Scott Highhouse (2006). *Essential of Personal Assesment and Selection*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Popham, W.J., (1999). *Classroom Assessment What Teachers Need to Know Second Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta. Grasindo
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
- Muslich, Masnur. (2010). *Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama
- Kusaeri dan Suprananto. (2012). *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryabrata, Sumadi (2000). *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

# MODEL ASESMEN UNTUK DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR SISWA SD DAN SMP

Ana Ratna Wulan, Elah Nurlaelah, Khaerudin Kurniawan, Setiya Utari, dan Fajri Nur Yusuf

Pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung

*E-mail: ana\_ratna\_upi@yahoo.com*

## ABSTRACT

*This research aimed to get an assessment model that can diagnose the Elementary and Junior High School students' learning difficulties. This research uses a descriptive analysis method. The students' learning difficulties analyzed in this research are elementary school students' difficulties in learning UASBN subjects and junior high school students' difficulties in learning National Final Examination (UN) subjects. This research was held in 2010/2011. The sample of this research was three provinces that are Banten, Nusa Tenggara Barat, and Maluku. In each province, elementary and junior high schools with low and intermediate UASBN/ UN achievement within the latest three years were chosen. The instruments of this research were student questioner, teacher questioner, teaching and learning observation form, document analysis form, and a set of diagnostic learning difficulties test instrument. The data of this research analyzed using qualitative method and descriptive statistics. The result of this research is an assessment model that in general can diagnose students' learning difficulties of all topics in each subject. The assessment model can be followed up by analyzing students' learning difficulties specifically for each topic. Based on the result of the research, the set of diagnostic learning difficulties test instrument should be in a form of essay or multiple choices completed with reason. Distraction option in multiple choices item should be developed based on the textbook and students' responses toward the essay test trial.*

**Keywords:** *assessment model, learning difficulties, elementary school, junior high school.*

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model asesmen yang dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Kesulitan belajar siswa dibatasi pada mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN untuk SD dan matapelajaran yang diujikan dalam UN untuk SMP. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2010/2011 dengan sampel penelitian berasal dari tiga provinsi yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Pada setiap provinsi tersebut, dipilih SD dan SMP berkategori sedang dan rendah berdasarkan hasil UASBN dan UN dalam tiga tahun terakhir. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas kuesioner siswa; kuesioner guru; lembar observasi pembelajaran; lembar analisis dokumen; serta perangkat tes diagnosis kesulitan belajar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dengan bantuan statistik deskriptif. Penelitian ini menghasilkan model asesmen kesulitan belajar siswa yang dapat mendiagnosis kesulitan siswa secara umum pada seluruh KD matapelajaran tertentu yang dapat dilanjutkan dengan analisis kesulitan belajar secara spesifik untuk setiap KD. Berdasarkan hasil penelitian ini perangkat soal diagnosis kesulitan belajar sebaiknya disusun dalam bentuk pilihan ganda beralasan atau essay. Option distraktor pada soal pilihan ganda dikembangkan berdasarkan textbook dan respon siswa pada ujicoba soal tes essay.*

**Kata kunci :** model asesmen; kesulitan belajar, SD, SMP



## **PENDAHULUAN**

Pendidikan dipercaya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga kebijakan strategik yang berkaitan dengan pendidikan menjadi fokus penting pada banyak negara untuk menghadapi perubahan global. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan adalah asesmen hasil belajar (Umar, 2007). Peran dan kedudukan asesmen formatif menjadi sangat penting sebagai umpan balik untuk peningkatan pencapaian hasil belajar (Popham, 1995).

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pelaksanaan Wajib Belajar Diknas sembilan tahun. Sekolah Dasar berfungsi meletakkan dasar-dasar konsep keilmuan dan kebiasaan berpikir yang dapat membentuk karakter belajar siswa. Sekolah Menengah Pertama berfungsi meletakkan dasar-dasar kemampuan untuk hidup di masyarakat. Oleh sebab itu

kedua jenjang sekolah tersebut sangat penting kedudukannya sebagai wahana persiapan awal dalam membentuk warga negara yang berkualitas. Menurut Rutherford & Ahlgren (1990) fungsi sekolah sebagai sarana mempersiapkan warga negara yang produktif sulit dicapai apabila pembelajaran yang diterapkan tidak tepat sasaran. Thomas (1990) menyatakan bahwa strategi belajar yang tepat sasaran diperoleh berdasarkan umpan balik hasil asesmen yang mampu mendiagnosis belajar siswa.

Ashlock (1994) menyatakan bahwa siswa yang selalu memperoleh hasil belajar yang rendah disebut sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan dari kegagalan menyelesaikan suatu masalah/pertanyaan serta dari pola jawaban yang diberikan. Menurut Subekti dan Firman (1985) kesulitan belajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor-faktor yang datangnya dari dalam individu siswa sendiri, misalnya kecerdasan, hambatan fisik, dan minat belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang datangnya dari luar siswa seperti lingkungan rumah, lingkungan sosial, fasilitas belajar, dan cara mengajar.

Menurut Wood (2007) kesulitan belajar dapat dialami seseorang dalam kurun waktu yang lama. Kesulitan belajar tersebut menghambat proses belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Gangguan atau kesulitan

belajar yang terkait dengan kemampuan akademik adalah: 1) keterlambatan dalam membaca, yaitu kesulitan dalam memahami makna kata-kata, tata bahasa dan susunan kalimat serta kesulitan dalam membandingkan ide-ide baru dengan yang telah diketahui; 2) keterlambatan dalam menulis, yaitu kesulitan dalam mengekspresikan gagasan atau ide dalam bentuk bahasa yang baik dan benar; 3) keterlambatan dalam berhitung, yaitu kesulitan dalam memahami simbol-simbol matematis, mengingat fakta seperti tabel perkalian, pemahaman konsep-konsep abstrak seperti pecahan dan pemahaman logika matematis.

Beberapa hasil penelitian (Hudiono, 1991; Priatna, 1994; Sumarmo dkk, 1999; Martini, 1999 dan Karso, 2000) yang dikemukakan dalam laporan Komariah (2003) menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa SD dalam mencapai Kompetensi Dasar bidang studi yang disyaratkan oleh kurikulum. Hasil-hasil penelitian yang dirangkum tersebut melaporkan bahwa siswa SD masih mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal pengukuran, soal pecahan, soal geometri dan memahami soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian Swediati dan Utordewo (2009) mengungkapkan bahwa terkait dengan literasi bahasa, siswa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran mereka secara mandiri dalam bentuk

esai. Prestasi siswa Indonesia dalam kemampuan membaca menurut studi PIRLS 2006 pada umumnya berada pada level 1 (terendah) dan hanya sejumlah kecil siswa yang memiliki kemampuan belajar di level 4 (tertinggi).

Hasil penelitian Wasis (2009) menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata siswa Indonesia dalam penalaran sains dan penerapan konsep-konsep sains masih rendah. Para siswa Indonesia secara keseluruhan masih kesulitan dalam melakukan analisis, prediksi, dan membuat inferensi.

Kesulitan belajar siswa yang telah terungkap dalam studi-studi tersebut diperoleh melalui asesmen dengan perangkat soal yang baik dan teruji. Sementara itu para guru di sekolah seringkali gagal dalam mengungkap kesulitan belajar tersebut oleh karena asesmen yang kurang tepat sasaran dan kualitas instrumen yang kurang memadai.

Beberapa hasil penelitian (Gabel, 1994; Corebima, 1999; Morgan, 2004; Wulan, 2007) menunjukkan tentang masih lemahnya pengetahuan dan kemampuan para guru di sekolah dalam melaksanakan asesmen baik tes maupun non tes yang sesuai dengan target penilaian. Hal ini menyebabkan kesulitan belajar siswa yang terkait dengan pencapaian kompetensi tidak dapat diungkap dengan jelas sehingga tidak dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu perlu dikembangkan model asesmen kesulitan belajar yang tepat bagi siswa SD dan SMP yang dapat

dijadikan acuan oleh sekolah dan para penyusun tes di Indonesia dalam memperbaiki pembelajaran. Melalui upaya perbaikan yang berkesinambungan selama program pembelajaran diharapkan pencapaian standar pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan.

### **Tujuan Studi**

Tujuan studi ini adalah menghasilkan model asesmen yang sesuai bagi diagnosis hambatan dan kesulitan belajar siswa sehingga guru dapat mengatasi dengan tepat kesulitan belajar siswa tersebut. Satuan pendidikan jenjang SD dan SMP dapat memanfaatkan model asesmen tersebut untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) berkesinambungan tentang kesulitan belajar siswa sehingga dapat terus meningkatkan kompetensi lulusannya dalam mencapai standar pendidikan nasional.

### **Batasan Masalah**

Kesulitan belajar siswa Sekolah Dasar (SD) dibatasi pada kompetensi akademis mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan sains. Sementara itu kesulitan belajar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibatasi pada kompetensi akademis mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN) yaitu matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, dan sains.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2010/2011. Tahapankegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penelurusan model asesmen kesulitan belajar berdasarkan kajian teoretis dan analisis hasil-hasil riset sebelumnya tentang kesulitan belajar; 2) Penyusunan model awal bagi diagnosis kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil analisis terhadap literatur; 3) Eksplorasi model asesmen kesulitan belajar siswa di SD dan SMP dengan memperhatikan kondisi *riil* sekolah; 3) penyusunan *revised* model asesmen kesulitan belajar siswa berdasarkan kecenderungan data.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga kawasan yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Berdasarkan kategori perolehan hasil UASBN dan UN dalam tiga tahun terakhir (tahun 2007, 2008, 2009) dipilih SD dan SMP dengan kategori sedang dan rendah pada masing-masing kawasan tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, studi ini dilakukan di tiga provinsi yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Pada setiap provinsi tersebut, dipilih dua SD dan dua SMP (kategori sedang dan rendah). Dengan demikian jumlah sekolah yang terlibat dalam studi ini adalah 12 sekolah (yaitu 6 SD dan 6 SMP).

Instrumen yang digunakan terdiri atas tes diagnosis kesulitan belajar siswa yang terdiri atas soal pilihan ganda dan *essay*. Soal pilihan ganda dikembangkan dari indikator esensial pada Kompetensi Dasar (KD) yang disyaratkan oleh Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP). Tabel spesifikasi soal dilengkapi dengan analisis *option* untuk mendiagnosis letak kesulitan siswa berdasarkan pada *option* yang dipilihnya. Selain dari itu digunakan angket guru serta angket siswa untuk mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris (khusus SMP). Observasi pembelajaran digunakan untuk melihat kesulitan belajar siswa dan bagaimana guru mengatasi kesulitan siswa tersebut. Rencana Pelaksanaan pembelajaran dan perangkat asesmen yang disusun guru dikumpulkan untuk melihat kemampuan guru dalam mendiagnosis kesulitan siswa dalam pembelajaran.

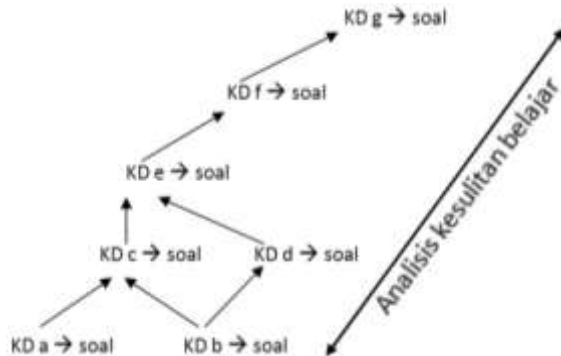
Data hasil angket dirangkum dalam bentuk tabel dan statistik deskriptif, sementara itu data hasil observasi dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data hasil tes diagnosis kesulitan belajar siswa dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang respons siswa terhadap model perangkat asesmen yang digunakan serta kekuatan dan kelemahan dari model tersebut dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Keseluruhan data selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis kecenderungannya bagi penyempurnaan model asesmen kesulitan belajar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelurusan kajian teoretis dan hasil-hasil riset sebelumnya, disusunlah model awal asesmen kesulitan siswa. Model-model asesmen kesulitan belajar yang biasa digunakan selama ini meliputi diagnosis kesulitan siswa untuk kemampuan/konsep/kecakapan spesifik tertentu (Sukmadinata, 1978; Thomas, 1990; Ashlock, 1994). Sementara itu guru seringkali masih kesulitan dalam menentukan mana kemampuan yang paling lemah dari semua kompetensi yang harus dikuasai siswa. Menurut Depdiknas (2007) diperlukan pengalaman lebih dari guru untuk mampu mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) manakah yang paling sulit dikuasai siswa.

Oleh karena itu model awal yang disusun dalam penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda. Perangkat asesmen dalam hal ini ditujukan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa dalam matapelajaran, bukan hanya dalam menguasai konsep/kompetensi tertentu saja. Dengan demikian model asesmen ini menggunakan matapelajaran sebagai satuan kajian sehingga kesulitan belajar siswa dapat dipotret secara menyeluruh. Perangkat asesmen disusun berdasarkan analisis kompetensi prasyarat yang disusun secara berjenjang berdasarkan hierarki. Dengan demikian diharapkan kesulitan belajar siswa

pada Kompetensi Dasar (KD) tertentu dapat ditelusuri lebih lanjut pada KD lain yang mendasari kompetensi tersebut. Model tersebut diharapkan memudahkan guru dalam melacak kesulitan siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Model awal tersebut disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Model asesmen kesulitan belajar siswa

Berdasarkan hasil ujicoba terhadap perangkat tes diagnosis diperoleh informasi bahwa siswa pada umumnya dapat menyelesaikan soal-soal pada tes pilihan ganda. Sedangkan untuk soal-soal *essay* masih banyak siswa yang gagal menyelesaikan soal tersebut (terutama untuk matematika). Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut: pertama, siswa kesulitan mengerjakan soal tersebut; kedua, waktu yang disediakan

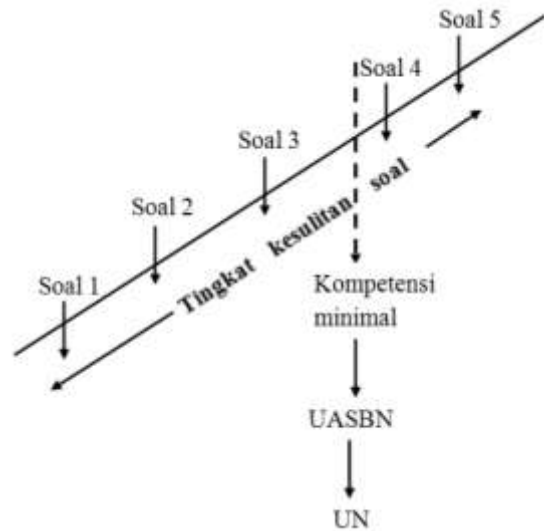
untuk siswa menyelesaikan soal tersebut kurang memadai.

Hasil angket menunjukkan bahwa banyak siswa SMP kesulitan dalam mempelajari materi/kompetensi: 1) Pada mata pelajaran sains yaitu perubahan kimia, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, dan unsur-senyawa-campuran; 2) Pada mata pelajaran matematika yaitu pecahan, bangun ruang dan penyusunan model matematis; 3) Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu kemampuan mendengarkan dan berbicara; 4) Pada mata pelajaran Bahasa Inggris yaitu kemampuan berbicara, membaca, dan mendengarkan. Sementara siswa SD secara umum menghadapi kesulitan dalam mempelajari materi/kompetensi: 1) Pada mata pelajaran Sains yaitu benda dan sifatnya, bumi dan alam semesta, proses yang terjadi pada makhluk hidup, energi dan perubahannya; 2) Pada mata pelajaran matematika yaitu bangun ruang, bangun datar, pecahan dan soal cerita; 3) Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara dan membaca. Berdasarkan temuan tersebut, maka asesmen kesulitan belajar siswa semestinya juga mampu mendiagnosis kesulitan belajar secara spesifik pada materi/pokok bahasan/kompetensi tertentu.

Hasil interpretasi terhadap jawaban siswa pada ujicoba perangkat asesmen juga menunjukkan bahwa model asesmen I kurang dapat

menggambarkan kesulitan siswa secara mendalam untuk setiap Kompetensi dasar (KD). Oleh karena setiap soal hanya dikembangkan berdasarkan indikator yang dianggap paling esensial pada setiap KD. Meskipun demikian, Model I memiliki kelebihan karena dapat memotret kesulitan belajar siswa secara lebih menyeluruh untuk mata pelajaran tertentu.

Oleh karena keterbatasan yang dimiliki Model I dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa secara lebih mendalam, maka jika diperlukan kesulitan belajar siswa untuk setiap KD dapat dianalisis lebih lanjut. Caranya dengan menguraikan semua indikator untuk KD yang sulit dikuasai siswa mulai dari indikator kemampuan terendah sampai indikator kemampuan tertinggi. Dengan demikian dapat ditelusuri pada tingkat kemampuan manakah siswa mengalami kesulitan dalam mencapai KD tertentu. Perlu disusun lebih dari satu soal untuk setiap indikator tersebut. Model asesmen ini digambarkan sebagai model II pada gambar 2.



Gambar 2. Model II asesmen kesulitan belajar siswa

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

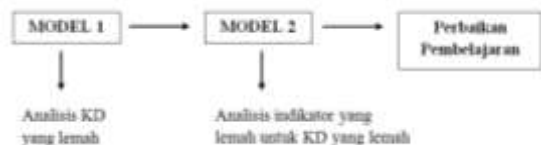
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa diagnosis kesulitan belajar siswa perlu dimulai dengan menggunakan model I yang dilanjutkan dengan penggunaan model II jika diperlukan. Secara umum model asesmen yang diperoleh disajikan pada gambar 3.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru sudah terbiasa menggunakan soal-soal pada tingkat kesulitan rendah dan sedang. Oleh sebab itu untuk mendiagnosis kesulitan

belajar siswa pada tahap kemampuan rendah sampai sedang, guru dapat menggunakan soal-soal yang telah ada. Sedangkan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa pada tingkat yang lebih tinggi, dapat digunakan bank soal UN atau UASBN yang sesuai dengan indikator tersebut.

### Simpulan

Berdasarkan hasil uji coba perangkat asesmen, sebaiknya soal-soal tes diagnosis kesulitan belajar siswa dikembangkan dengan diawali dari soal *essay*. Untuk mencegah tidak adanya respon jawaban siswa pada soal-soal tersebut, ujicoba soal perlu dilaksanakan tidak hanya di sekolah kategori sedang dan rendah (yang diduga kuat banyak mengalami kesulitan belajar), akan tetapi juga di sekolah kategori tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh daftar respon jawaban siswa yang lebih lengkap untuk setiap soal, mulai dari yang menunjukkan penguasaan tinggi hingga penguasaan sangat rendah.



Gambar 3. *Revised* model asesmen kesulitan belajar

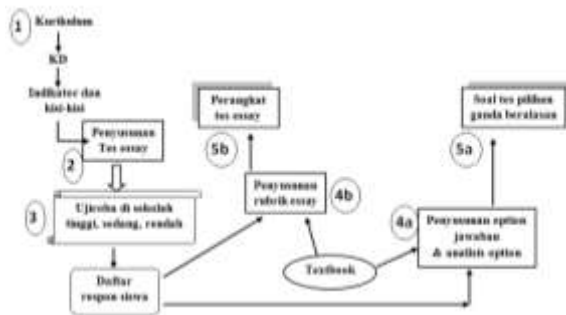
Setelah diperoleh daftar respon jawaban siswa terhadap soal-soal *essay*, dapat dilakukan identifikasi terhadap pola jawaban siswa yang mungkin menunjukkan: tidak tahu; tidak mampu; tidak paham; kurang terampil; terjadi miskonsepsi; atau ketidakmampuan menguasai konsep prasyarat. Daftar respon siswa tersebut dapat digunakan untuk memperkaya *option* pengecoh bagi penyusunan soal pilihan ganda (selain dari *option* pengecoh yang disusun berdasarkan *textbook*). Pada tabel spesifikasi perlu disusun analisis *option* (interpretasi kesulitan siswa jika memilih pengecoh tertentu) untuk memandu proses diagnosis. Sementara itu untuk pengembangan soal *essay* lebih lanjut, daftar respons jawaban siswa dapat digunakan untuk memperkaya rubrik analisis kesulitan siswa.

Soal tes diagnosis pilihan ganda sebaiknya disusun beralasan. Siswa masih harus mengemukakan alasan berdasarkan *option* yang dipilihnya untuk menghindari respon yang diperoleh dengan cara menebak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru telah menyusun atau mencantumkan perangkat asesmen kinerja (non tes) pada rencana pembelajaran mereka. Namun guru masih kesulitan dalam mengimplementasikannya pada pembelajaran sehari-hari (data angket dan observasi pembelajaran). Data hasil penelitian juga menunjukkan kecenderungan masih lemahnya respon dan umpan balik yang diberikan oleh

sebagian besar guru terhadap kesulitan belajar siswa. Dengan demikian masih perlu disusun suatu panduan asesmen kesulitan belajar siswa baik dalam bentuk tes maupun non tes yang dapat dilakukan oleh guru dalam asesmen sehari-hari.

Oleh karena banyaknya siswa yang ditemukan masih mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi mendengarkan dan berbicara (mata pelajaran bahasa), maka asesmen kinerja pada pembelajaran sehari-hari diperlukan untuk menganalisis kesulitan belajar siswa dalam menguasai kedua kompetensi tersebut.



Gambar 4. Model pengembangan soal tes kesulitan belajar siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashlock, R.B. (1994). *Error Patterns in Computation*. New York: Maxmillan Publishing Company.
- Depdinas. (2007). *Penilaian Diagnostik Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Corebima, D. (1999). *Proses dan Hasil Pembelajaran MIPA di SD, SLTP, dan SMU: Perkembangan Penalaran Siswa Tidak Dikelola secara Terencana*. Makalah Seminar Hasil Penelitian Peningkatan Kualitas Pendidikan MIPA. Bandung, Agustus 1999.
- Gabel, D.L. (1994). *Handbook of Research on Science Teaching and Learning*. New York: McMillan Publishing Company.
- Komariah (2003). *Pengembangan kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SD melalui Kegiatan Diskusi Kelompok*. Tesis Magister. Bandung: SPS UPI.



- Morgan, B.M. (2004). "Research-Based Instructional Strategies: Preservice Teacher' Observations of Inservice teacher' Use". *National Forum Journal*, July, 2/2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Popham, W.J. (1995). *Classroom Assessment*. Boston: Allyn & Bacon.
- Rutherford, F.J. & Ahlgren, A. (1990). *Science for All Americans: Scientific Literacy*. New York: Oxford University Press.
- Thomas, R.M. (1990). *Diagnosis and Treating Learning Difficulties*. Santa Barbara: University of California.
- Subenti, R. & Firman, H. (1985). *Evaluasi Hasil Belajar dan Pengajaran remedial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sukmadinata, N.S. (1978). *Pengajaran Singkat tentang Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan belajar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Swediati, N. & Utordewo, F. (2009). Prestasi Membaca Siswa Indonesia dalam Studi PIRLS 2006. *Makalah Seminar Mutu Pendidikan dasar dan Menengah Hasil Penelitian Puspendik*. Jakarta 28-29 Oktober.
- Umar, J. (2007), *Ujian Nasional dan peningkatan mutu pendidikan*. Bahan Presentasi Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional tahun 2003.
- Wasis (2009). Kemampuan Sains Siswa Indonesia dalam Studi TIMSS 2007. *Makalah Seminar Mutu Pendidikan dasar dan Menengah Hasil Penelitian Puspendik*. Jakarta 28-29 Oktober.
- Wood, D. (2007). *Kiat Mengatasi Gangguan Belajar*. Jogjakarta : Katahati.
- Wulan, A.R. (2007). Pembekalan kemampuan *Performance Assessment* pada calon Guru Biologi. Disertasi. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

ISSN 2303-0070

# VAALUE

Jurnal Evaluasi & Asesmen Pendidikan

